

**MANAJEMEN PEMBIAYAAN SARANA DAN PRASARANA PADA
PONDOK PESANTREN DARUL AMIN KOTA PALANGKA RAYA**



Oleh

ADE MUHAMMAD RIZKY

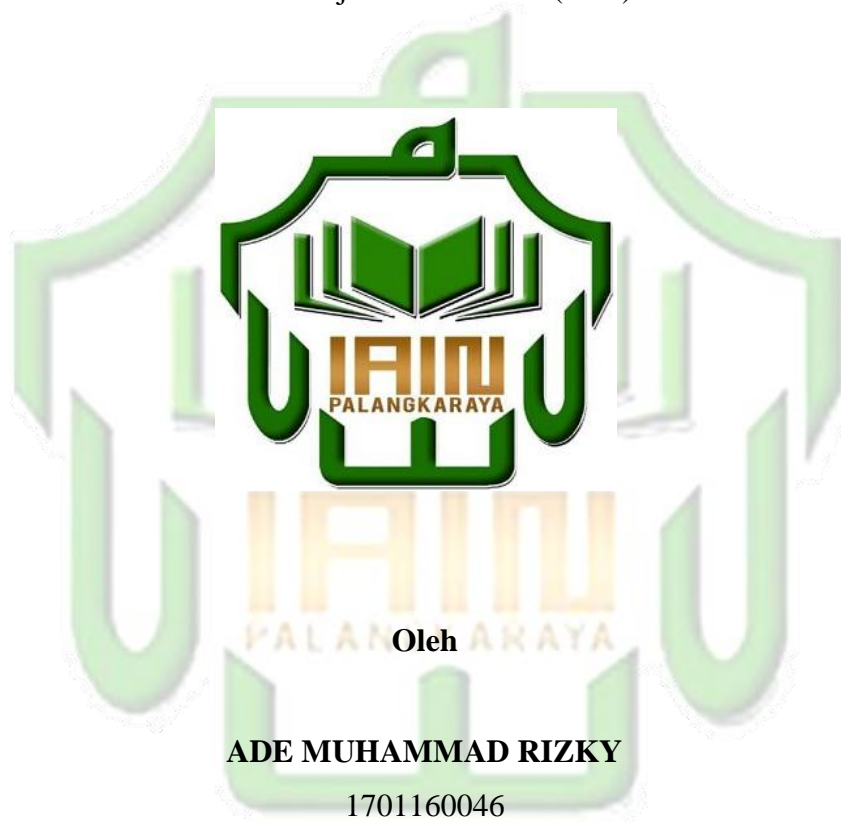
1701160046

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
TAHUN 2021 M/1443 H**

**MANAJEMEN PEMBIAYAAN SARANA DAN PRASARANA PADA
PONDOK PESANTREN DARUL AMIN KOTA PALANGKA RAYA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd)



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
JURUSAN TARBIYAH
PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM
TAHUN 2021 M/1443**

PERNYATAAN ORISINALITAS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ade Muhammad Rizky
NIM : 1701160046
Jurusan/Prodi. : Tarbiyah/Manajemen Pendidikan Islam
Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan

Menyatakan skripsi ini dengan judul “Manajemen Pembiayaan Sarana dan Prasarana pada Pondok Pesantren Darul Amin Kota Palangka Raya”, adalah benar karya saya sendiri. Jika kemudian hari karya ini terbukti duplikat atau plagiat, maka skripsi dan gelar yang saya peroleh dibatalkan.

Palangka Raya, 9 Agustus 2021

Yang Membuat Pernyataan,



Ade Muhammad Rizky

NIM. 1701160046

PENGESAHAN SKRIPSI

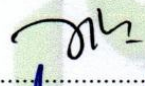
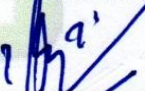
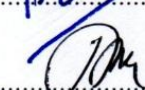
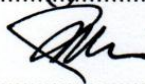
Judul : Manajemen Pembiayaan Sarana dan Prasarana pada Pondok Pesantren Darul Amin Kota Palangka Raya
Nama : Ade Muhammad Rizky
N I M : 1701160046
Fakultas : Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan
Jurusan : Tarbiyah
Program Studi : Manajemen Pendidikan Islam

Telah diujikan dalam Sidang/Munaqasah Tim Penguji Skripsi Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Palangka Raya

Hari : Rabu
Tanggal : 22 September 2021 M/ 15 Safar 1443 H

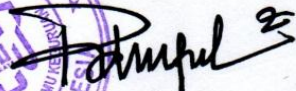
TIM PENGUJI:

1. Dr. Hj. Hamidah, M.A
(Ketua Sidang/Penguji)
2. Dr. Jasmani, M.Ag
(Penguji Utama)
3. Dr. Dakir, MA
(Penguji)
4. Dr. Ahmadi, M.S.I
(Sekretaris/Penguji)


.....

.....

.....

.....

Mengetahui:
Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu
Keguruan




Dr. Hj. Rodhatul Jennah, M.Pd
NIP. 196710031993032001

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Manajemen Pembiayaan Sarana dan Prasarana pada Pondok Pesantren Darul Amin Kota Palangka

Nama : Ade Muhammad Rizky

NIM : 1701160046

Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan


Jurusan : Tarbiyah

Program Studi : Manajemen Pendidikan Islam

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, dapat disetujui untuk disidangkan oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Palangka Raya.

Palangka Raya, 9 Agustus 2021

Pembimbing I,



Dr. Dakir, M.A
NIP. 196903232003121002

Pembimbing II,



Dr. Ahmadi, S.Ag., M.S.I
NIP. 197210102003121002

Mengetahui:
Wakil Dekan Bidang Akademik,



Dr. Nurul Wahdah, M.Pd
NIP. 19800307 200604 2 004

Ketua Jurusan Tarbiyah,



Sri Hidayati, MA
NIP. 19720929 199803 2 002

NOTA DINAS

Hal : **Mohon Diuji Skripsi**
Saudara Ade Muhammad Rizky

Palangka Raya, 9 Agustus 2021

Kepada
Yth. Ketua Jurusan Tarbiyah
FTIK IAIN Palangka Raya
di –
PALANGKA RAYA

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : ADE MUHAMMAD RIZKY
NIM : 1701160046
Fakultas : TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
Jurusan : TARBIYAH
Program Studi : MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM
Jenjang : STRATA SATU (S-1)
Judul Skripsi : **MANAJEMEN PEMBIAYAAN SARANA DAN PRASARANA PADA PONDOK PESANTREN DARUL AMIN KOTA PALANGKA RAYA**

Sudah dapat dimunaqasahkan untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan pada Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Dr. Dakir, MA
NIP. 196903232003121002



Dr. Ahmadi, S.Ag., M.S.I
NIP. 197210102003121002

ABSTRAK

Pembiayaan dalam sebuah lembaga pendidikan merupakan hal terpenting dalam terlaksananya suatu pendidikan yang berkualitas. Pembiayaan ini sangat diperlukan terlebih lagi dalam pembiayaan sarana dan prasarana untuk menunjang tercapainya visi dan misi suatu lembaga pendidikan.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana manajemen pembiayaan sarana dan prasarana pada Pondok Pesantren Darul Amin Kota Palangka Raya, yang dapat dilihat dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian akuntabilitas atau laporan pertanggungjawabannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif dimana pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. data dianalisis dengan cara mereduksi data yang relevan, memaparkan dan menarik kesimpulan. Teknik pengabsahan data yang dilakukan penulis menggunakan teknik *triangulasi*. *Triangulasi* adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai perbandingan data itu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen pembiayaan sarana dan prasarana pada Pondok Pesantren Darul Amin Kota Palangka Raya yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian akuntabilitas sudah berjalan dengan semestinya. Dalam perencanaan pembiayaan sarana dan prasarana pada Pondok Pesantren Darul Amin yang dilakukan oleh pimpinan pondok pesantren beserta pengurus lainnya disetiap awal bulan ataupun akhir bulan yang menentukan pembiayaan sarana dan prasarana apa saja yang akan dibiayai selama satu bulan kedepan. Kegiatan pelaksanaan pembiayaan sarana dan prasarana meliputi penerimaan dan pengeluaran biaya yang sesuai dengan aturan dan perencanaan penggunaan biaya dalam kurun waktu satu bulan kedepan. Dalam pengendalian akuntabilitas pembiayaan sarana prasarana dilakukan oleh bendahara pondok dengan membuat laporan pembiayaan yang akan dilaporkan kepada pimpinan pondok dan pihak lainnya yang terkait pada saat awal bulan atau akhir bulan sesuai dengan ketentuan.

Kata kunci : Pembiayaan, Sarana dan Prasarana

ABSTRAC

Financing in an educational institution is the most important thing in the implementation of a quality education. This financing is needed especially in financing facilities and infrastructure to support the achievement of the vision and mission of an educational institution.

The purpose of this study is to find out how the management of the financing of facilities and infrastructure at the Darul Amin Islamic Boarding School in Palangka Raya City, which can be seen from the planning, implementation, and control of accountability or accountability reports. The method used in this research is descriptive qualitative method where data collection uses interview, observation and documentation techniques. The data were analyzed by reducing the relevant data, explaining and drawing conclusions. The data validation technique carried out by the author uses the triangulation technique. Triangulation is a technique of checking the validity of data that utilizes something other than the data for checking purposes or as a comparison of the data.

The results showed that the management of the financing of facilities and infrastructure at the Darul Amin Islamic Boarding School in Palangka Raya which includes planning, implementation, and accountability control has been running properly. In planning the financing of facilities and infrastructure at the Darul Amin Islamic Boarding School carried out by the leadership of the Islamic boarding school along with other administrators at the beginning of each month or the end of the month which determines what facilities and infrastructure will be financed for the next month Activities for the implementation of the financing of facilities and infrastructure include the receipt and expenditure of costs in accordance with the rules and planning for the use of costs within the next one month. In controlling the accountability of infrastructure financing, it is carried out by the treasurer of the cottage by making a financing report which will be reported to the leadership of the cottage and other related parties at the beginning of the month or the end of the month in accordance with the provisions.

Keywords : Financing, Facilities, and Infrastructur

KATA PENGANTAR

Pertama-tama penulis mengucapkan Alhamdulillah kepada Allah SWT yang telah memberikan kemudahan kepada penulis untuk menyusun dan menyelesaikan penelitian ini dan tak lupa pula sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Penelitian ini tidak akan berhasil tanpa bantuan pihak-pihak yang benar-benar konsen dibidang penelitian. Oleh sebab itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Palangka Raya Ibu Dr. Hj. Rodhatul Jennah, M.Pd
2. Wakil Dekan Bidang Akademik Ibu Dr. Nurul Wahdah, M.Pd
3. Ketua Jurusan Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Palangka Raya Ibu Sri Hidayati, MA
4. Sekertaris Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Bapak Muzakki, M.Pd
5. Para dosen pembimbing yakni Pembimbing I Bapak Dr. Dakir, MA dan Pembimbing II Bapak Dr. Ahmadi, M.S.I
6. Pimpinan Pondok Pesantren Darul Amin Kota Palangka Raya Bapak Achmad Junaidi, M.Pd.I
7. Bendahara Pondok Pesantren Darul Amin Kota Palangka Raya Ahmad Rijani, SE

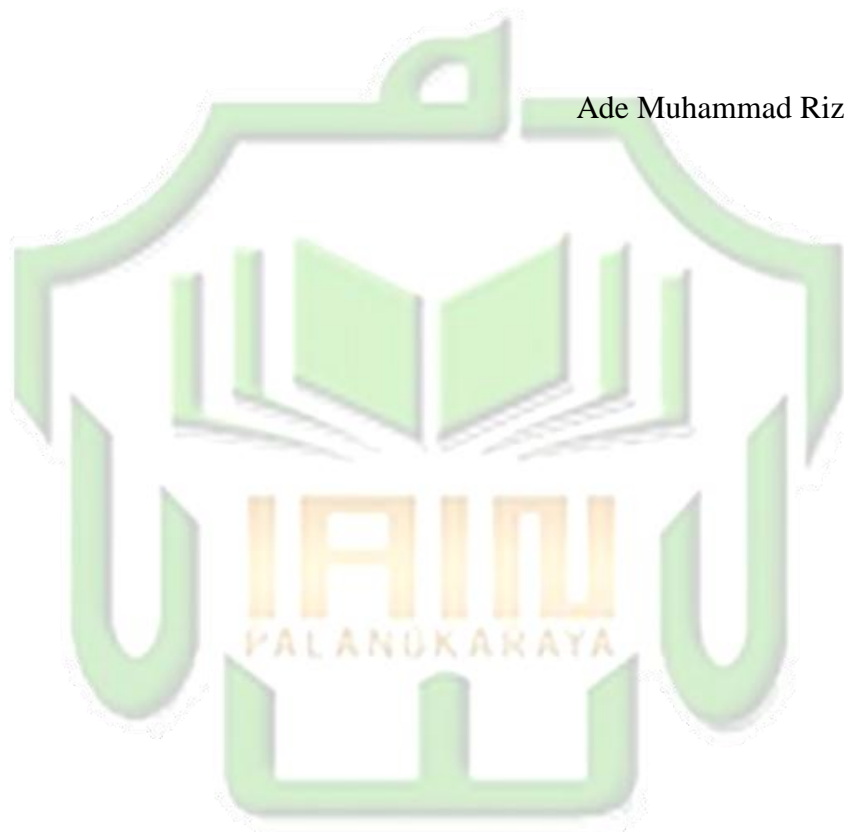
Penulis juga mengucapkan banyak terimakasih kepada teman-teman yang telah ikut membantu dalam menyusun dan mengumpulkan data didalam penelitian ini, tanpa bantuan teman-teman semua tidak mungkin penelitian ini bisa diselesaikan.

Terakhir penulis mengucapkan terimakasih kepada seluruh keluarga yang telah bersabar didalam memberikan doa dan perhatiannya

Palangaka Raya, 13 Juni 2021

Penulis,

Ade Muhammad Rizky



MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَانَتْهُمْ بُنْيَانًا مَرْمُوسًا

Artinya :

“Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalan-Nya dalam barisan yang teratur, mereka seakan-akan seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh.”



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil ‘Alamin, segala puji bagi Allah. Tuhan semesta alam. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Rasulullah SAW, dengan rasa syukur saya persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua Orang tua yaitu Bapak Yusnior dan Ibu Siti Maftuhah, yang senantiasa medoakan dan meridhoi setiap langkah saya, serta terimakasih atas segala dukungannya yang tiada henti demi tercapainya tujuan. Semoga Allah memberikan hidayah, keberkahan, kesehatan dan perlindungan untuk mereka. Aaamiiin,
2. Adik-adik saya Audia Zahra dan Aina Maulida Rahmah beserta keluarga besar yang selalu memberikan dukungan untuk melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi dan yang selalu memberikan motivasi
3. Teman-teman MPI 2017 dan teman-teman lainnya yang selalu memberikan semangat dan bantuannya
4. Kepada dosen-dosen yang telah memberikan ilmu, semoga diberikan keberkahan, kesehatan, kebahagiaan oleh Allah SWT
5. Kampus Hijau tercinta IAIN Palangka Raya, semoga semakin maju dan berkarakter

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
NOTA DINAS	v
ABSTRAK	vi
ABSTRAC	vii
KATA PENGANTAR	viii
MOTTO.....	x
PERSEMBAHAN	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR BAGAN.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Hasil Penelitian yang Relevan	7
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Tujuan Penelitian.....	11
E. Manfaat Penelitian	11
F. Defenisi Operasional.....	12
G. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II TELAAH TEORI.....	15

A. Deskripsi Teoritik.....	15
B. Kerangka Berpikir	34
BAB III METODE PENELITIAN.....	36
A. Metode dan Alasan Menggunakan Metode.....	36
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	38
C. Instrumen Penelitian	38
D. Sumber Data	39
E. Teknik Pengumpulan Data.....	40
F. Teknik Pengabsahan Data.....	43
G. Teknik Analisis Data	43
BAB IV HASIL PENELITIAN	45
A. Profil Pondok Pesantren Darul Amin	45
B. Sarana dan Prasarana	49
C. Hasil Penelitian.....	50
BAB V PEMBAHASAN	70
A. Perencanaan pembiayaan sarana dan prasarana pada Pondok Pesantren Darul Amin Kota Palangka Raya	70
B. Pelaksanaan pembiayaan sarana dan prasarana pada Pondok Pesantren Darul Amin Kota Palangka Raya	74
C. Pengendalian Akuntabilitas pembiayaan sarana dan prasarana pada Pondok Pesantren Darul Amin Kota Palangka Raya.....	76
BAB VI PENUTUP	79
A. Kesimpulan.....	79

B. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	83
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	86



DAFTAR BAGAN

Bagan 1 Kerangka Berpikir.....	35
--------------------------------	----



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Sarana dan Prasarana	49
Tabel 2 Perencanaan pembiayaan	54
Tabel 3 Pelaksanaan pembiayaan listrik bulan januari	58
Tabel 4 Pelaksanaan pembiayaan listrik bulan Februari.....	58
Tabel 5 Pelaksanaan pembiayaan listrik bulan maret	58
Tabel 6 Pelaksanaan pembiayaan listrik bulan april	59
Tabel 7 Pelaksanaan pembiayaan listrik bulan mei	59
Tabel 8 Pelaksanaan pembiayaan listrik bulan juni	59
Tabel 9 Pelaksanaan pembiayaan listrik bulan juli	60
Tabel 10 Pelaksanaan pembiayaan listrik bulan agustus	60
Tabel 11 Pelaksanaan pembiayaan mobil operasional.....	61
Tabel 12 Pelaksanaan pembiayaan wifi	61

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Transkrip Wawancara	86
Lampiran 2 Foto Penelitian	96
Lampiran 3 Administrasi Penelitian.....	103
Curiculum Vitae	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu agenda utama pemerintah Indonesia dalam pembangunan nasional adalah pembangunan di bidang pendidikan yang bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk itu, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan lokal, nasional, dan global.

Secara sosiologis, potret pendidikan Islam baik yang berbentuk madrasah, sekolah umum berciri Islam dan pondok pesantren mulai dari pendidikan dasar, menengah dan pendidikan tinggi keagamaan Islam, secara kuantitatif terus mengalami perkembangan, akan tetapi secara kualitas penyelenggaraan pendidikan tersebut belum diimbangi dengan mutu secara maksimal. Karena itu, diperlukanlah pengelolaan mutu pendidikan, melalui berbagai pendekatan, strategi dalam membangun mutu pendidikan Islam, sesuai standarisasi pendidikan, sehingga kehadiran pendidikan Islam dapat mewarnai pendidikan di Indonesia.

Produktivitas suatu lembaga pendidikan sangat dipengaruhi oleh faktor manajemen pembiayaan. Manajemen merupakan komponen utama

dalam rangka pencapaian tujuan lembaga pendidikan. Dalam hubungan ini perlu diperhatikan bahwa manajemen tidak melaksanakan sendiri kegiatan-kegiatan yang bersifat operasional, melainkan mengatur tindakan pelaksanaan dengan membentuk sistem. Sistem adalah, "Suatu jaringan kerja atau network yang terdiri dari prosedur-prosedur yang berhubungan satu sama lain yang tergabung bersama-sama (untuk membentuk suatu kegiatan atau untuk mencapai sasaran spesifik"

يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرِجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ

مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ

Artinya : "Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian (urusan) itu naik kepada-Nya dalam satu hari yang kadarnya adalah seribu tahun menurut perhitunganmu"

Menurut tafsir jalalayn ayat tersebut adalah (Dia mengatur urusan dari langit ke bumi) selama dunia masih ada (kemudian naiklah) urusan dan pengaturan itu (kepada-Nya dalam satu hari yang lamanya adalah seribu tahun menurut perhitungan kalian) di dunia dan di dalam surah Al-Ma'arij ayat 4 disebutkan bahwa kadar masa itu adalah lima puluh ribu tahun. Makna yang dimaksud ialah bahwa saat hari kiamat bagi orang-orang kafir terasa begitu lama sekali karena sangat ngerinya. Berbeda halnya dengan orang yang beriman, ia merasa seolah-olah hanya sebentar saja bahkan waktunya terasa lebih pendek daripada satu salat fardu yang dilakukannya di dunia. Demikianlah menurut keterangan yang dijelaskan di dalam hadis.

Mohammad Saroni (2012: 11) Pendanaan/Keuangan nampaknya mempunyai peran yang signifikan dalam suatu lembaga apapun, khususnya lembaga pendidikan. Proses pendidikan dan pembelajaran merupakan kegiatan terencana yang dalam penyusunannya tidak dapat lepas dari faktor pembiayaan. Hal ini karena di dalam pelaksanaannya, ada banyak hal yang harus dilakukan, disiapkan, dan selanjutnya diadakan agar proses berlangsung lancar. Berbagai hal yang harus disiapkan dan disediakan oleh pengelola pendidikan, khususnya sarana dan prasarana pendidikan dan pembelajaran. Dengan dana ini, semua sarana dan prasarana serta operasional pendidikan dapat disediakan oleh sekolah. Kelengkapan sarana dan prasarana pembelajaran akan berimplikasi pada semangat siswa untuk belajar dan memudahkan guru dalam mengajar.

Barnawi dan M. Arifin (2014:47) Sarana prasarana merupakan material yang sangat penting disebuah lembaga pendidikan. Hal ini dikarenakan dengan adanya sarana prasarana pendidikan yang lengkap, maka akan menunjang proses pendidikan di Sekolah. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 24 Ayat 1 menyatakan bahwa setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang system pendidikan nasional BAB XII “ Setiap satuan pendidikan formal dan nonformal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosioal, emosional, dan kejiwaan peserta didik. Ketentuan mengenai penyediaan sarana dan prasarana pendidikan pada semua satuan pendidikan sebagaimana dimaksud diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah”.

Mastuhu (1994: 6), mengatakan bahwa pondok pesantren adalah lembaga pendidikan tradisional Islam untuk memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran agama Islam (*Tafaqquh Fiddin*) dengan menekankan pentingnya moral agama Islam sebagai pedoman hidup bermasyarakat sehari-hari. Di era globalisasi yang penuh persaingan dan tantangan serta semakin meningkatnya ilmu pengetahuan dan teknologi, mengharuskan lembaga pendidikan pondok pesantren untuk meningkatkan mutunya, sehingga dapat membina para santri yang sesuai dengan tuntutan zaman dan masyarakat modern seperti sekarang ini sebagaimana yang penulis ketahui, sekarang ini telah banyak pondok pesantren yang membekali para santrinya tidak hanya dengan ilmu agama tetapi juga dengan ilmu pengetahuan umum. Bahkan ada juga pondok pesantren yang membekali santrinya dengan berbagai macam ketrampilan.

Hal ini bertujuan agar ketika santri telah selesai mengikuti pendidikan di pesantren, alumni tidak hanya pandai dalam ilmu agama saja tetapi juga

pandai dalam ilmu pengetahuan umum dan berbagai ketrampilan yang dapat berguna untuk kehidupan dirinya sendiri maupun masyarakat di sekitarnya. Pondok pesantren apabila menutup diri dari perubahan sosial yang berkembang cepat, maka pondok pesantren akan semakin ketinggalan dan mengalami kemunduran, realitas ini memang telah menjadi suatu dilema yang tidak mudah dipecahkan oleh sebuah pondok pesantren.

Pada realitas lain, perkembangan pondok pesantren di masa depan ditentukan oleh kemampuan pondok pesantren itu sendiri dalam mengadaptasi dan mengatasi segala kesulitan maupun tantangan yang selama ini dihadapi melihat perkembangan pendidikan pondok pesantren sekarang ini, maka dapat dirasakan arti pentingnya suatu kegiatan manajemen administratif pendidikan, dimana pendidikan yang ada di pondok pesantren dikelola secara modern dengan sistem pelaksanaannya dilakukan secara klasikal.

Pengelolaan pembiayaan dikenal dengan manajemen keuangan. Penyelenggaraan pondok pesantren memerlukan manajemen keuangan. Tidak saja terkait sumber dana yang mampu mencukupi kebutuhan operasional pondok, baik dari donatur maupun sumber yang lain. Keuangan pondok perlu dikelola sebaik-baiknya, agar dana-dana yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang tercapainya visi dan tujuan pondok. Oleh karena itu, maka pondok pesantren tidak dapat lepas dari kegiatan manajemen pembiayaan dalam hal ini kegiatan tersebut meliputi: perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembiayaan pesantren.

Berdasarkan keputusan kepala kantor kementerian agama kota Palangka Raya dengan nomor : B-3454/Kk.15.5/3/PP.00.7/09/2017 tentang izin operasional penyelenggaraan Pondok Pesantren Darul Amin Palangka Raya, memutuskan member izin operasional penyeleggaraan kepada Pondok Pesantren Darul Amin Kota Palangka Raya, yang beralamatkan di Jl. G. Obos XII Jl. Yakut I No. 18, Desa/Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Yayasan Al Amin, berdiri tahun 1999.

Dijelaskan dalam profil Pondok Pesantren Darul Amin Yayasan Al-Amin terketuk dan prihatin terhadap perkembangan moralitas anak-anak usia remaja di Kota Palangka Raya, yang pada umumnya jauh dari agama. Di samping itu, sarana ibadah yang tersebar di Kalimantan Tengah sunyi dari syiar seperti kegiatan da'wah dan pengajaran al-Qur'an bagi anak-anak, remaja, pemuda dan orang tua juga masih sangat minim. Hal itu sangat mengkhawatirkan bagi perkembangan generasi muslim di kemudian hari. Mengingat keadaan umat Islam yang terjepit di antara yang awan dan kebebasan moral diiringi dengan lunturnya nilai-nilai lunturnya nilai-nilai luhur keislaman di era teknologi ini.

Menurut hasil wawancara peneliti dengan bendahara Pondok Pesantren Darul Amin untuk sistem pembiayaan pendidikan di pondok pesantren Darul Amin didapatkan dari infaq yang diberikan oleh orang tua santri, masyarakat lainnya dan pemerintah daerah selanjutnya digunakan untuk kebutuhan santri sehari-hari seperti keperluan operasional dan

pendidikan. Walaupun pendapatan di Pondok Pesantren Darul Amin tidak pernah direncanakan seberapa banyak yang bisa didapatkan namun pendapatannya selalu dalam jumlah yang banyak sehingga bisa mencukupi segala keperluan pondok pesantren. Manajemen pembiayaan pendidikannya direncanakan setiap awal bulan serta di pertanggungjawabkan setiap akhir bulan.

Pondok pesantren tersebut mempunyai sebuah masalah yang menimbulkan daya tarik peneliti. Adapun isi dari masalah tersebut berupa hasil rekapitulasi daftar pemasukan dan pengeluaran pondok pesantren tersebut tersebut dalam perbulan. Di dalam kolom pemasukan sudah tertera daftar nama sebagai donatur, dan di kolom pengeluaran berisi tentang biaya yang dikeluarkan untuk keperluan pondok pesantren tersebut. Keuangan di Pondok Pesantren Darul Amin sangat transparan dan laporan keuangannya disebarkan ke donatur dan instansi-instansi yang bersangkutan namun ada beberapa masalah dalam mengelola keuangan seperti pengeluaran lebih banyak dari anggaran yang sudah rencanakan, pengeluaran tidak sesuai dengan pemasukan dari donatur, ada pengeluaran yang tidak terduga dan harus anggarkan sehingga mengurangi kas

B. Hasil Penelitian yang Relevan

Ketika melakukan penelitian, penulis mengadakan kajian terhadap penelitian yang sudah ada. Sebagai penguat proposal ini, penulis menghubungkan dengan berbagai sumber yang ada. Salah satunya ialah penelitian terdahulu yang telah dilakukan antara lain :

1. Dalam tesis dengan judul penelitian Manajemen Pembiayaan Sarana Prasarana Pondok Pesantren Ibbadurahman Tenggarong Seberang, Institut Agama Islam Negri Samarinda, dapat ditarik kesimpulan bahwa manajemen pembiayaan pondok pesantren sarana prasarana 1) sumber pembiayaan berasal dana APBD, APBN orang tua, masyarakat, usaha sendiri.2) pengelolaan menggunakan POAC (Planning, Organizing, Actuating, Controlling) yang diatur semua tujuan system operasi dalam operasi dalam istem organisasi. guna untuk mengelola keuangan dengan baik . 2) pelaporan berupa laporan pertanggung jawaban kepada pimpinan pondok secara rinci .
2. Dalam jurnal Manajemen dan Pendidikan Islam Vol. 5, No. 2, Desember 2019, dengan judul Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan Pondok Pesantren: Studi Kasus Pondok Pesantren An Nawawi Berjan Purworejo, dari hasil penelitian di pondok pesantren putra An Nawawi Berjan Purworejo tentang manajemen sarana dan prasarana dan menganalisanya maka diperoleh kesimpulan bahwa pondok pesantren putra An Nawawi sudah melaksanakan kegiatan manajemen sarana dan prasarana dengan prosedur. Pertama, perencanaan yang dilakukan melalui rapat perencanaan program di pondok pesantren putra An Nawawi yang dilaksanakan setiap awal tahun yaitu setiap dimulainya periode kepengurusan untuk membahas program pesantren pada periode masa jabatan yang didalamnya termasuk kebutuhan sarana dan prasarana pesantren. Kedua, pengadaan merupakan kegiatan pengadaan sarana dan prasarana pondok pesantren sesuai hasil

kesepakatan bersama dalam proses perencanaan; inventarisasi yaitu kegiatan pencatatan jenis barang, jumlah barang, dan kondisi barang, semua barang milik pondok pesantren putra An Nawawi sudah terinventarisir secara rapi dalam daftar inventaris barang. Ketiga, pemeliharaan yaitu kegiatan merawat dan menjaga sarana dan prasarana pondok pesantren. Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana pondok pesantren putra An Nawawi dilakukan oleh semua orang yang berada di pesantren dari santri, ustaz dan pengurus. Adapun pengontrolan dilaksanakan oleh kepala bagian sarana dan prasara pondok pesantren. Keempat, penghapusan, yang dimaksud dengan penghapusan adalah penghapusan nama barang dari daftar inventarisasi dikarenakan barang tersebut sudah tidak rusak dan tidak bisa dimanfaatkan lagi. Pondok pesantren putra An Nawawi Berjan Purworejo juga melaksanakan kegiatan penghapusan sarana dan prasarana dengan cara mengganti jika memungkinkan dan menghapus dari daftar inventaris barang.

3. Dalam jurnal *Journal of Islamic Educational Management* dengan judul tata kelola sarana dan prasarana pondok pesantren dapat disimpulkan pemeliharaan sarana dan prasarana di Pondok Pesantren Alquran Al-Ghozaliyyah meliputi jangka pendek dan jangka panjang, jangka pendeknya yaitu pemeliharaan sarana dan prasarana yang dilakukan setiap hari (terus menerus) dan jangka panjangnya yaitu pemeliharaan yang dilakukan jangka waktu tertentu (berkala). Para santri lebih banyak mendahulukan merawat dan memelihara rumah kyai serta tempat ibadah

dibandingkan dengan merawat asramanya. Serta untuk memaksimalkan kualitas piket santri maka perlu dibentuk tim pengawas agar pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana yang ada di pondok pesantren berjalan secara optimal.

Perbedaan dalam penelitian kali ini dengan penelitian sebelumnya dimana penelitian kali ini lebih terfokuskan pada pentingnya pembiayaan dalam sebuah lembaga pendidikan, terlebih lagi dalam pembiayaan sarana dan prasarananya. Pada penelitian kali ini memiliki tiga rumusan masalah yaitu tentang perencanaan pembiayaan sarana dan prasarana, pelaksanaan pembiayaan sarana dan prasarana, dan pengendalian akuntabilitas pembiayaan sarana dan prasarana.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dibentuk beberapa rumusan masalah yang dapat diteliti:

1. Bagaimana perencanaan pembiayaan sarana dan prasarana pada Pondok Pesantren Darul Amin Palangka Raya?
2. Bagaimana pelaksanaan pembiayaan sarana dan prasarana pada Pondok Pesantren Darul Amin Palangka Raya?
3. Bagaimana pengendalian akuntabilitas pembiayaan sarana dan prasarana pada Pondok Pesantren Darul Amin Palangka Raya?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang manajemen pembiayaan pendidikan pada Pondok Pesantren Darul Amin yang dapat diuraikan sebagai berikut

1. Mendeskripsikan perencanaan pembiayaan sarana dan prasarana Pondok Pesantren Darul Amin Palangka Raya
2. Mendeskripsikan pelaksanaan pembiayaan sarana dan prasarana Pondok Pesantren Darul Amin Palangka Raya
3. Mendeskripsikan pengendalian akuntabilitas atau pertanggung jawaban pembiayaan sarana dan prasarana Pondok Pesantren Darul Amin Palangka Raya

E. Manfaat Penelitian

Sebagai hasil dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau masukan bagi perkembangan ilmu pendidikan Islam dan dapat menjadi acuan kepada peneliti lain untuk melakukan penelitian lebih lanjut

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, bagi peneliti untuk menambah pengetahuan yang akan dikembangkan dengan hasil dan pemahaman yang telah dicapai dan mengembangkan teori yang telah diperoleh. Bagi lembaga dapat menjadi

acuan selanjutnya dalam manajemen pembiayaan pendidikan lembaga tersebut

F. Definisi Operasional

Untuk mempermudah gambaran yang jelas dan menghindari kesalah pahaman penafsiran terhadap judul skripsi, maka penulis mempertegas maksud-maksud dari istilah yang digunakan dalam judul tersebut dengan memperjelas penegertian dari manajemen pembiayaan sarana dan prasarana yaitu pengelolaan semua bentuk keuangan baik usaha memperoleh atau mengumpulkan modal untuk membiayai aktifitas atau kegiatan yang secara langsung maupun tidak langsung untuk menunjang sarana dan prasarana pada lembaga tersebut, baik yang dikeluarkan oleh lembaga maupun orang yang terlibat. Pembiayaan pondok pesantren selain bersumber berasal dari orang tua santri juga bersumber dari pemerintah dan sumbangan sukarela.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari enam BAB dengan urutan rangkaian sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar belakang masalah
- B. Hasil Penelitian yang Relevan/ Sebelumnya
- C. Rumusan masalah
- D. Manfaat penelitian
- E. Batasan masalah
- F. Sistematika Penulisan

BAB II : TELAAH TEORI

- A. Deskripsi Teori
- B. Kerangka Berpikir dan Pertanyaan penelitian

BAB III : METODE PENELITIAN

- A. Metode dan Alasan Menggunakan Metode
- B. Tempat dan Waktu Penelitian
- C. Instrumen Penelitian
- D. Sumber Data
- E. Teknik Pengumpulan Data
- F. Teknik Pengabsahan Data
- G. Teknik Analisis Data

BAB IV : HASIL PENELITIAN

- A. Profil Pondok Pesantren
- B. Sarana dan Prasarana
- C. Hasil Penelitian

BAB V : PEMBAHASAN

- A. Perencanaan pembiayaan sarana dan prasarana pada Pondok Pesantren Darul Amin Kota Palangka Raya
- B. Pelaksanaan pembiayaan sarana dan prasarana pada Pondok Pesantren Darul Amin Kota Palangka Raya
- C. Pengendalian Akuntabilitas pembiayaan sarana dan prasarana pada Pondok Pesantren Darul Amin Kota Palangka Raya

BAB VI : PENUTUP

A. Keimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA



BAB II

TELAAH TEORI

A. Deskripsi Teoritik

1. Pengertian Manajemen

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008: 870), manajemen adalah penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran. Manajemen pembiayaan pendidikan dimaksudkan sebagai suatu manajemen terhadap fungsifungsi keuangan.

Menurut George R. Terry (Mulyono, 2008: 16) menyatakan bahwa manajemen merupakan sebuah proses yang khas, yang terdiri dari tindakan-tindakan: perencanaan, pengorganisasian, penggantian, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan lain-lain.

Pengertian lain disampaikan oleh Hasibuan (Mulyono, 2008: 18) mengatakan bahwa manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya yang lain secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu. Kemudian, (Mulyono 2008: 16) menyimpulkan pengertian manajemen dari pendapat beberapa ahli, bahwa manajemen adalah proses pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan dan kerjasama orang-orang lain.

Menurut Johnson (Pidarta, 2004: 3), menyatakan bahwa manajemen ialah proses mengintegrasikan sumber-sumber yang tidak

berhubungan menjadi sistem total untuk menyelesaikan suatu tujuan. Di mana yang dimaksud sebagai sumber mencakup orang, alat, media bahan-bahan, uang dan sarana. Semua diarahkan dan dikoordinasikan agar terpusat dalam rangka menyelesaikan tujuan.

2. Manajemen Pembiayaan

Pidarta, (2004:4) Manajemen Pembiayaan dalam lembaga pendidikan berbeda dengan manajemen pembiayaan perusahaan yang berorientasi profit atau laba. Organisasi pendidikan dikategorikan sebagai organisasi publik yang nirlaba (*non-profit*). Oleh karena itu, manajemen pembiayaan memiliki keunikan sesuai dengan misi dan karakteristik pendidikan. Manajemen dalam pendidikan dapat diartikan sebagai aktivitas memadukan sumber-sumber pendidikan agar terpusat dalam usaha mencapai tujuan pendidikan yang telah ditentukan sebelumnya

Dalam artikel jurnal Budi Budaya, volume 18, nomor 1 hal 47 menyatakan bahwa Secara umum proses manajemen pembiayaan sekolah meliputi: perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan dan pertanggung-jawaban. Perencanaan merupakan langkah awal dalam proses manajemen pembiayaan. Perencanaan adalah suatu proses yang rasional dan sistematis dalam menetapkan langkah-langkah kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengertian tersebut mengandung unsur-unsur bahwa di dalam perencanaan ada proses, ada kegiatan yang rasional dan sistematis serta adanya tujuan yang akan dicapai. Perencanaan sebagai proses, artinya suatu kejadian

membutuhkan waktu, tidak dapat terjadi secara mendadak. Perencanaan pembiayaan sekolah disesuaikan dengan rencana pengembangan sekolah secara keseluruhan, baik pengembangan jangka pendek maupun jangka panjang. Pengembangan jangka pendek berupa pengembangan satu tahunan. Pengembangan jangka panjang berupa pengembangan lima tahunan, sepuluh tahunan, bahkan dua puluh lima tahunan. Berdasarkan rencana pengembangan sekolah, baik jangka pendek maupun jangka panjang, maka dibuatlah perencanaan pembiayaan sekolah baik perencanaan jangka pendek maupun jangka panjang.

Berbagai beberapa pendapat ahli di atas, maka dapat disimpulkan secara umum bahwa manajemen merupakan suatu proses pemanfaatan sumber daya manusia melalui kerjasama dengan orang lain untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif dan efisien dalam manajemen pembiayaan pendidikan yang dilakukan melalui tindakan perencanaan, pelaksanaan, akuntabilitas.

a. Perencanaan Pembiayaan

perencanaan merupakan tahapan pertama dalam manajemen pembiayaan pendidikan untuk menentukan strategi, tujuan, standar operasional, dan menjadi tolak ukur dalam pelaksanaan manajemen pembiayaan pendidikan. Perencanaan pembiayaan pendidikan meliputi penyusunan anggaran kebutuhan, analisis kebutuhan, penentuan skala prioritas, dan pembagian tugas atau wewenang.

Pada sebuah lembaga maupun organisasi apapun bentuk dan namanya, sebelum melangkah untuk mencapai tujuan, maka terlebih dahulu ada perencanaan. Perencanaan pada sebuah lembaga sangat esensial, karena pada kenyataannya, perencanaan memegang peranan yang lebih penting dibanding fungsi yang lain. Tanpa ada perencanaan, maka akan sulit mencapai suatu tujuan.

Seorang perencana pendidikan dituntut untuk memiliki kemampuan dan wawasan yang sangat luas agar dapat menyusun sebuah rancangan yang dapat dijadikan pegangan pada pelaksanaan proses pendidikan selanjutnya.

Perencanaan dalam manajemen pembiayaan pendidikan adalah merencanakan sumber dana untuk menunjang kegiatan pendidikan dan tercapainya tujuan pendidikan. Sumber dana tersebut antara lain meliputi anggaran rutin, Dana Penunjang Pendidikan (DPD), Subsidi Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan (SBPP), Bantuan Operasional dan Perawatan (BOP), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), (BP3), donator, badan usaha, serta sumbangan lain-lain Untuk Pondok Pesantren Darul Amin sendiri sumber dana berasal dari infaq wali santri, subsidi pemerintah, yayasan, dan masyarakat secara luas.

Setelah mengetahui sumber dana yang ada, selanjutnya pondok pesantren membuat kebutuhan pondok pesantren dalam waktu satu bulan dalam menyusun perencanaan tersebut kepala yayasan sebaiknya membentuk tim. Setelah itu tim dan kepala yayasan menyelesaikan

tugas, merinci semua anggaran pendapatan dan belanja pondok pesantren dengan melibatkan para ustadz dan ustadzah ini akan diperoleh rencana yang mantap, dan secara moral semua ustadz dan kepala satuan biayanya sudah ditentukan Kepala yayasan bersama dengan staf sekolah diharapkan dapat menyusun prioritas penggunaan dana anggaran secara cermat.

b. Pelaksanaan Pembiayaan

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan.

Pelaksanaan merupakan unsur kedua dari manajemen yang sangat penting. Setiap orang, baik manajer atau karyawan biasa merupakan bagian dari organisasi, karena itu setiap orang yang termasuk di dalam organisasi berkewajiban untuk memenuhitugas dan fungsinya karena ia adalah bagian dari organisasi secara keseluruhan.

Seorang manajer atau pimpinan harus selalu mendorong orang-orangnya kearah perkembangan organisasi yang positif, kreatif, dan produktif adanya inisiatif, sikap yang kreatif dan produktif dari semua anggota dari pangkat yang serendah-rendahnya sampai tertinggiakan menjamin organisasi berjalan dengan baik.

Secara garis besarnya pelaksanaan keuangan dikelompokkan dalam suatu kegiatan, yakni penerimaan dan pengeluaran. Berikut mengenai pelaksanaan manajemen keuangan:

1) Penerimaan

Setiap lembaga pendidikan pada umumnya melaksanakan tugasnya menerima dana dari berbagai sumber. Penerimaan dari sumber-sumber dana perlu dibukukan sedangkan prosedur pengelolaannya selaras dengan ketentuan yang disepakati, baik berupa konsep teoritis maupun peraturan yang berlaku.

2) Pengeluaran

Setiap penggunaan keuangan perlu melalui pengajuan keuangan secara tertulis dan sedapat mungkin hanya program-program yang termasuk dalam perencanaan keuangan saja yang didanai, agar mudah mengawasnya. Aturan pengeluaran keuangan harus dicatat sesuai dengan waktu serta peruntukannya.

Pelaksanaan pembiayaan dalam garis besarnya dapat dikelompokkan ke dalam dua kegiatan, yakni:

- 1) Penerimaan pembiayaan pendidikan sekolah dari sumber-sumber dana perlu dibukukan berdasarkan prosedur pengelolaan yang selaras dengan ketentuan yang disepakati. Adapun sumber dana tersebut, meliputi: anggaran rutin, anggaran pembangunan, anggaran penunjang pendidikan, dana masyarakat, dan donator;

2) Pengeluaran, yakni dana yang sudah diperoleh dari berbagai sumber perlu digunakan secara efektif dan efisien. Artinya perolehan dana dalam pengeluarannya harus didasarkan pada kebutuhan-kebutuhan yang telah disesuaikan dengan perencanaan pembiayaan pendidikan disekolah

c. Pengendalian Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kondisi seseorang yang dinilai oleh orang lain karena kualitas performansinya dalam menyelesaikan tugas untuk mencapai tujuan yang menjadi tanggung jawabnya. Akuntabilitas di dalam manajemen keuangan berarti penggunaan uang sekolah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan dan peraturan yang berlaku maka pihak sekolah membelanjakan uang secara bertanggung jawab. Pertanggungjawaban dapat dilakukan kepada orang tua, masyarakat dan pemerintah.

Dalam implementasi manajemen pembiayaan pengendalian akuntabilitas berkaitan dengan pertanggungjawaban terhadap apa yang telah dicapai harus dilakukan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan Sedangkan Pertanggungjawaban biaya pondok pesantren adalah menyangkut seluruh pengeluaran dana dalam kaitannya dengan apa yang telah dicapai sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan proses pertanggung jawaban adalah penerimaan, penyimpanan, dan

pembayaran atau penyerahan kepada pihak-pihak yang berhak untuk mengetahuinya.

Evaluasi dan pertanggungjawaban terhadap apa yang telah dicapai harus dilakukan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan (pemerintah, masyarakat, dan wali murid). Pertanggungjawaban merupakan pembuktian dan penentuan bahwa apa yang dimaksud sesuai dengan apa yang dilaksanakan, sedangkan apa yang dilaksanakan sesuai dengan tugas. Proses ini menyangkut tentang penerimaan, dan pembayaran kepada pihak-pihak yang berhak.

Untuk menunjang manajemen pembiayaan yang baik, kepala yayasan atau pondok pesantren hendaknya memperhatikan:

- a. Perlengkapan administrasi keuangan, yaitu pondok pesantren memiliki tempat khusus untuk menyimpan perlengkapan administrasi keuangan, memiliki alat hitung dan memiliki buku-buku yang dibutuhkan.
- b. Pondok pesantren memiliki perencanaan pembiayaan yang telah disepakati disahkan oleh yang berwenang, serta memiliki program panjabarannya.

3. Sarana dan Prasarana

a. Pengertian Sarana dan Prasarana

Kamus Besar Bahasa Indonesia (1988: 700) Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai

maksud atau tujuan; alat. Menurut E. Mulyasa (2005), sarana pendidikan adalah peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dan menunjang proses pendidikan, khususnya proses belajar, mengajar, seperti gedung, ruang kelas, meja kursi, serta alat-alat dan media pengajaran.

Sarana pendidikan merupakan sarana penunjang bagi proses belajar-mengajar. Menurut Tim Penyusun Pedoman Pembakuan Media Pendidikan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, yang dimaksud dengan sarana adalah semua fasilitas yang diperlukan dalam proses belajar-mengajar, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak agar pencapaian tujuan pendidikan dapat berjalan dengan lancar, teratur, efektif dan efisien.

Sedangkan pengertian prasarana secara etimologis (arti kata) prasarana berarti alat tidak langsung untuk mencapai tujuan. Dalam pendidikan misalnya lokasi/tempat, bangunan sekolah, lapangan olah raga, uang dan sebagainya. Menurut Ibrahim Bafadal prasarana pendidikan adalah semua perangkat kelengkapan dasar yang secara tidak langsung menunjang pelaksanaan proses pendidikan di sekolah

Jadi, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud sarana pendidikan adalah semua fasilitas yang secara langsung dan menunjang proses pendidikan, khususnya proses belajar mengajar, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak agar pencapaian tujuan pendidikan dapat berjalan dengan lancar, teratur, efektif dan

efisien. Sedangkan yang dimaksud dengan prasarana pendidikan adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan atau pengajaran, seperti halaman, kebun, taman sekolah, jalan menuju sekolah, tetapi dimanfaatkan secara langsung untuk proses belajar mengajar, seperti taman sekolah untuk pengajaran biologi, halaman sekolah sebagai sekaligus lapangan olah raga, komponen tersebut merupakan sarana pendidikan.

b. Standar sarana dan prasarana

Standar sarana dan prasarana menurut peraturan pemerintah no. 19 tahun 2005 tentang standar pendidikan nasional bab VII yang membahas tentang standar sarana dan prasarana, yaitu :

1) Pasal 42 :

- a) Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi, perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.
- b) Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain,

tempat berkreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan

2) Pasal 43

- a) Standar keragaman jenis peralatan laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), laboratorium bahasa, laboratorium computer, dan peralatan pembelajaran lain dalam satuan pendidikan dinyatakan dalam daftar yang berisi jenis minimal peralatan yang harus tersedia
- b) Standar jumlah peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat sebelumnya dinyatakan dalam rasio minimal jumlah peralatan per peserta didik
- c) Standar buku perpustakaan dinyatakan dalam jumlah judul dan jenis buku perpustakaan satuan pendidikan
- d) Standar jumlah buku teks pelajaran perpustakaan dinyatakan dalam rasio minimal jumlah buku teks pelajaran perpustakaan satuan pendidikan untuk setiap peserta didik
- e) Kelayakan isi, bahasa, penyajian, dan kegrafikan buku teks pelajaran dinilai oleh BSNP dan ditetapkan dengan peraturan menteri
- f) Standar sumber belajar lainnya untuk setiap satuan pendidikan dinyatakan dalam rasio jumlah sumber belajar

terhadap peserta didik sesuai dengan jenis sumber belajar dan karakteristik satuan pendidikan

3) Pasal 44

- a) Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) untuk bangunan satuan pendidikan, lahan praktek, lahan untuk prasarana penunjang, dan lahan pertamanan untuk menjadikan satuan pendidikan suatu lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat.
- b) Standar lahan satuan pendidikan dinyatakan dalam rasio luas lahan per peserta didik.
- c) Standar letak lahan satuan pendidikan mempertimbangkan letak lahan satuan pendidikan di dalam klaster satuan pendidikan sejenis dan sejenis, serta letak lahan satuan pendidikan di dalam klaster satuan pendidikan yang menjadi pengumpulan masukan peserta didik.
- d) Standar letak lahan satuan pendidikan mempertimbangkan jarak tempuh maksimal yang harus dilalui oleh peserta didik untuk menjangkau satuan pendidikan tersebut.
- e) Standar letak lahan satuan pendidikan mempertimbangkan keamanan, kenyamanan, dan kesehatan lingkungan.

- 4) Pasal 45
 - a) Standar rasio luas ruang kelas per peserta didik dirumuskan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
 - b) Standar rasio luas bangunan per peserta didik dirumuskan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
 - c) Standar kualitas bangunan minimal pada satuan pendidikan dasar dan menengah adalah kelas B.
 - d) Standar kualitas bangunan minimal pada satuan pendidikan tinggi adalah kelas A.
 - e) Pada daerah rawan gempa bumi atau tanahnya labil, bangunan satuan pendidikan harus memenuhi ketentuan standar bangunan tahan gempa.
 - f) Standar kualitas bangunan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), (4), dan (5) mengacu pada ketetapan menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.
- 5) Pasal 46
 - a) Satuan pendidikan yang memiliki peserta didik, pendidik, dan/atau tenaga kependidikan yang memerlukan layanan khusus wajib menyediakan akses ke sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

- b) Kriteria penyediaan akses sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
- 6) Pasal 47
 - a) Pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 sampai dengan Pasal 46 menjadi tanggung jawab satuan pendidikan yang bersangkutan.
 - b) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dan berkesinambungan dengan memperhatikan masa pakai.
 - c) Pengaturan tentang masa pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
 - 7) Pasal 48

Standar sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 sampai 47 dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan peraturan menteri.
- c. Sarana dan Prasarana Pondok Pesantren

Seftiani et al. (2018). Sarana dan prasarana yang ada di pondok pesantren harus dirawat agar selalu dalam keadaan baik dan dapat berfungsi dengan baik pula. Ananda & Banurea (2017) Proses pemeliharaan sarana dan prasarana dibagi menjadi menjadi dua jenis yaitu

 - (1) pemeliharaan sehari-hari dan

(2) pemeliharaan secara berkala

Gunawan & Benty (2017), Megasari (2020), Mulida (2016), pemeliharaan sehari-hari dapat dilakukan setiap hari baik ketika akan dipakai atau setelah dipakai, pemeliharaan sehari-hari dilakukan oleh pengguna barang dan pengguna barang bertanggung jawab atas barang yang dipakainya, pemeliharaan sehari-hari intinya adalah mengkondisikan sarana dan prasarana dalam keadaan siap pakai dan mengurangi resiko kerusakan. Sedangkan pemeliharaan berkala dilakukan dalam jangka waktu tertentu dan dilakukan oleh penanggung jawabnya, yang intinya adalah pemeliharaan berkala mencakup sarana dan prasarana yang digunakan dalam jangka waktu yang panjang. Ellong, (2018) Nasrudin & Maryadi, (2019) Sarana dan prasarana yang sudah terkondisikan dengan baik dapat mendukung proses pembelajaran di suatu lembaga Kegiatan pemeliharaan barang didahului dengan penggunaan sarana dan prasarana yaitu dengan berhati-hati dalam penggunaannya, pemeliharaan juga harus dilakukan dengan sebaik-baiknya agar sarana dan prasarana di Pondok Pesantren selalu enak dipandang, mudah digunakan dan tidak cepat rusak. Sebagai contoh, rumah kyai dan majelis merupakan sarana dan prasarana yang bersih dan terawat. Hal tersebut dikarenakan para santri lebih mendahulukan sikap khidmah kepada kyai selaku pimpinan pondok pesantren

4. Pondok Pesantren

a. Pengertian Pondok Pesantren

Pondok pesantren berasal dari dua kata, yaitu pondok dan pesantren. Pondok berasal dari bahasa Arab “Funduq” yang berarti tempat menginap, atau asrama. Sedangkan pesantren berasal dari bahasa Tamil, dari kata santri, diimbui awalan pe dan akhiran – an yang berarti para penuntut ilmu.

Menurut Abdurrahman Wahid pesantren adalah: Sebuah kompleks dengan lokasi yang umumnya terpisah dari kehidupan di sekitarnya. Dalam kompleks itu berdiri beberapa buah bangunan: rumah kediaman pengasuh (di daerah berbahasa Jawa disebut *kyai*, di daerah berbahasa Sunda *ajegan*, dan di daerah berbahasa Madura *nun* atau *bendara*, disingkat *ra*); sebuah surau atau mesjid; tempat pengajaran diberikan (bahasa Arab madrasah, yang juga terlebih sering mengandung konotasi sekolah); dan asrama tempat tinggal para siswa pesantren.

Dari pengertian di atas, maka dapat dipahami bahwa pesantren adalah lembaga pendidikan Islam tradisional yang mempelajari ilmu agama (*tafaqquh fi al-dîn*) dengan penekanan pada pembentukan moral santri agar bisa mengamalkannya dengan bimbingan kiai dan menjadikan kitab kuning sebagai sumber primer serta masjid sebagai pusat kegiatan

b. Tujuan Pondok Pesantren

1) Tujuan Khusus

Tujuan Khusus, yaitu mempersiapkan para santri untuk menjadi orang yang alim dalam ilmu agama yang diajarkan oleh kyai yang bersangkutan serta mengamalkannya dalam masyarakat.

2) Tujuan Umum

Tujuan Umum, yaitu membimbing anak didik untuk menjadi manusia yang berkepribadian islam yang sanggup dengan ilmu agamanya menjadi muballigh islam dalam masyarakat sekitar.

3) Ketentuan Pondok Pesantren

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2019, BAB I tentang ketentuan umum pondok pesantren, sebagai berikut:

a) Pondok Pesantren, Dayah, Surau, Meunasah, atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT., menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil'alamin yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam,

keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- b) Pendidikan Pesantren adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh Pesantren dan berada di lingkungan Pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis kitab kuning atau dirasah islamiah dengan pola pendidikan muallimin.
- c) Kitab Kuning adalah kitab keislaman berbahasa Arab atau kitab keislaman berbahasa lainnya yang menjadi rujukan tradisi keilmuan Islam di Pesantren
- d) Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin adalah kumpulan kajian tentang ilmu agama Islam yang terstruktur, sistematis, dan terorganisasi.
- e) Pendidikan Muadalah adalah Pendidikan Pesantren yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis Kitab Kuning atau Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan muallimin secara berjenjang dan terstruktur.
- f) Pendidikan Diniyah Formal adalah Pendidikan Pesantren yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal sesuai dengan kekhasan Pesantren yang berbasis Kitab Kuning secara berjenjang dan terstruktur.

- g) Ma'had Aly adalah Pendidikan Pesantren jenjang pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Pesantren dan berada di lingkungan Pesantren dengan mengembangkan kajian keislaman sesuai dengan kekhasan Pesantren yang berbasis Kitab Kuning secara berjenjang dan terstruktur.
- h) Santri adalah peserta didik yang menempuh pendidikan dan mendalami ilmu agama Islam di Pesantren.
- i) Kiai, Trran Guru, Anre Gurutta, Inyiak, Syekh, Ajengan, Buya, Nyai, atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Kiai adalah seorang pendidik yang memiliki kompetensi ilmu agama Islam yang berperan sebagai figur, teladan, dan/atau pengasuh Pesantren
- j) Dewan Masyayikh adalah lembaga yang dibentuk oleh Pesantren yang bertugas melaksanakan sistem penjaminan mutu internal Pendidikan Pesantren.
- k) Majelis Masyayikh adalah lembaga mandiri dan independen sebagai perwakilan Dewan Masyayikh dalam merumuskan dan menetapkan sistem penjaminan mutu Pendidikan Pesantren.
- l) Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945.

m) Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.

n) Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

B. Kerangka Berpikir

1. Kerangka berpikir

Berdasarkan tinjauan pustaka yang peneliti lakukan, peneliti berfikir bahwa sebuah pembiayaan merupakan suatu hal yang penting dalam kegiatan pendidikan. Bisa dikatakan tanpa pembiayaan, pendidikan tidak akan mungkin berjalan sesuai dengan dengan rencana dan mencapai tujuan yang ditentukan.

Pembiayaan dapat dilihat dari biaya lancar (*recurrent cost*) dan biaya kapital (*capital cost*). Biaya lancar adalah biaya yang dikeluarkan untuk jangka waktu pendek dan relatif sering kali bisa diperbaharui atau habis pakai (*perisable cost*). Biaya berkapital adalah biaya investasi yang dikeluarkan untuk jangka waktu yang relatif panjang dan tidak habis pakai (*durable cost*) seperti biaya investasi gedung dan peralatan, biaya penyelenggaraan dan pembinaan difokuskan ke biaya lancar.

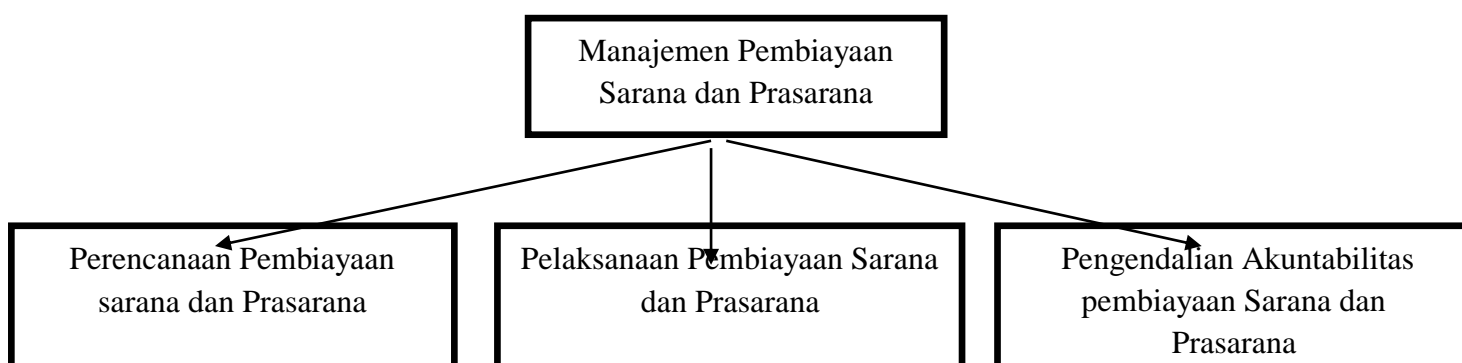
Penelitian juga memiliki anggapan bahwa pembiayaan suatu lembaga pendidikan memiliki hubungan terhadap manajemen pembiayaan

di Pondok Pesantren Darul Amin. Anggaran ini muncul, karena dengan pembiayaan yang cukup suatu lembaga pendidikan dapat melengkapi segala yang dibutuhkan untuk mempelancar kegiatan belajar mengajar yang diselenggarakan. Dengan demikian, peneliti dapat menggambarkan kerangka berfikir penelitian, dimana pengelolaan pendidikan akan sangat ditentukan oleh pembiayaan pendidikan.

Salah satu yang krusial dalam manajemen lembaga pendidikan adalah manajemen pembiayaan pendidikan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, akuntabilitas atau pertanggungjawaban pembiayaan pendidikan. Pencarian sumber penerimaan biaya terdiri dari beberapa sumber: pemerintah, non pemerintah maupun sumber dari penyelenggaraan lembaga pendidikan. Tujuan akhir dari pengelolaan pembiayaan adalah terselenggaranya proses pendidikan yang efektif dan efisien sesuai tujuan institusional lembaga.

Sarana prasarana merupakan material yang sangat penting disebuah lembaga pendidikan. Hal ini dikarenakan dengan adanya sarana prasarana pendidikan yang lengkap, maka akan menunjang proses pendidikan di Sekolah.

Bagan .1 Kerangka Berpikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode dan Alasan Menggunakan Metode

Jenis metode yang digunakan pada penelitian ini ialah menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian yang sebenarnya menunjukkan dan menekankan pada proses, dan berarti tidak diteliti secara ketat dan terukur, dilihat dari kualitas, jumlah intensitas atau frekuensi. Penelitian kualitatif memiliki tahapan penelitian, adapun tahapan-tahapannya sebagai berikut:

1. Identifikasi masalah yang akan diteliti.
2. Mulai mengenal dan terlibat dengan proses konteks dari sumber informasi. Melakukan eksplorasi terhadap sumber-sumber yang memungkinkan dari informasi yang dicari.
3. Mulai terlibat dengan beberapa contoh dokumen yang relevan.
4. Mengekstraksi data dari beberapa dokumen.
5. Melakukan revisi terhadap data yang ada menyeleksi beberapa kasus tambahan

Kirk dan Miller pada buku metodologi penelitian kualitatif, Lexy J. Moleong (2000: 3) mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya

Sedangkan menurut ashshafa (2000: 16) dalam bukunya “Metode Penelitian Hukum”, menghasilkan data yang deskriptif yang bersumber dari tulisan atau ungkapan dan tingkah laku yang dapat diobservasi dari manusia. Selanjutnya menurut Bogdan dan Taylor sebagaimana yang dikutip oleh Lexy J. Moleng (2000: 16), mendefinisikan penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Menurutnya, pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik.

Untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan saat ini dan melihat kaitan antara variabel yang ada. Penelitian ini tidak menguji suatu hipotesis atau tidak ada hipotesis, melainkan hanya mendeskripsikan informasi apa adanya sesuai dengan variabel-variabel yang diteliti. Dapat dipahami bahwa maksudnya ialah pendekatan yang nantinya menghasilkan data-data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan yang bersumber dari orang-orang dan perilaku manusia.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, menjelaskan bahwa penelitian kualitatif deskriptif ini cenderung untuk mengetahui dan mengungkapkan gambaran peristiwa yang terjadi di lokasi penelitian secara detail dan lengkap bagaimana Manajemen pembiayaan sarana dan prasarana pada Pondok Pesantren Darul Amin.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan Pondok Pesantren Darul Amin kota Palangka Raya, Jalan Yakut 1 No. 18 Kota Palangka Raya, Email : ppdarulaminpky@gmail.com No. HP: 0813 4929 9036

2. Waktu Penelitian

Adapun waktu untuk meneliti yang akan dilakukan selama dua bulan setelah penyelenggaraan seminar. Serta mendapatkan izin dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Palangka Raya.

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan (Bulan)								
		Jan-21	Feb-21	Mar-21	Apr-21	Mei-21	Jun-21	Jul-21	Agust-21	Sep-21
1	Menyusun proposal skripsi	✓								
2	Seminar proposal skripsi dan menyusun instrumen penelitian		✓	✓						
3	Menggali dan menganalisa data penelitian				✓	✓	✓			
4	Menyusun laporan hasil penelitian							✓	✓	
5	Ujian skripsi									✓

C. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian menurut Suharsimi Arikunto (2006: 149) merupakan alat bantu bagi peneliti dalam mengumpulkan data, sedangkan menurut Suharsimi Arikunto dalam edisi sebelumnya adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya

lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap dan sistematis, sehingga mudah diolah.

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah instrumen pokok dan instrument penunjang. Instrumen pokok adalah peneliti sendiri sedangkan instrumen penunjang adalah pedoman observasi, pedoman wawancara, dan pedoman dokumentasi sesuai pedoman Suharsimi Arikunto.

D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian menyatakan dari mana data dapat diperoleh. Sumber data utama dalam penelitian ini adalah Orang-orang yang terkait, sehingga kata-kata, dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain Lofland dalam Moleong (2007: 157). Sumber data dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang utama diperlukan dalam penelitian ini, yaitu data yang diperoleh langsung di lapangan, meliputi data dan informasi melalui wawancara dan observasi yang dilakukan di pondok pesantren Darul Amin melalui kepala pondok, bendahara, bagian perlengkapan dan informan lainnya.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung atau data yang diperoleh dari sumber-sumber yang sudah ada menggunakan teknik dokumentasi. Data sekunder diperoleh melalui sumber yang tidak langsung memberikan data atau informasi kepada

peneliti yang diperoleh dari pihak lain selain sumber primer. Data primer yang dibutuhkan antara lain dokumen-dokumen yang berkaitan secara langsung dengan penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan

1. Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah situasi peran antar pribadi bersemuka (*face-to-face*), ketika seseorang, yaitu pewawancara, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian, kepada seseorang yang diwawancara atau responden (Kerlinger dalam Sanapiah, 1995:133). Termasuk responden dalam kondisi normal, tidak tergesa-gesa, tidak saling contek, sehingga diharapkan dapat diperoleh jawaban yang benar-benar murni dan aktual.

Metode wawancara ini penulis gunakan untuk mengumpulkan data dan memperoleh data dari lokasi penelitian tentang manajemen pembiayaan pendidikan pondok pesantren yang berhubungan dengan penelitian ini

Teknik wawancara adalah teknik yang dilakukan dengan cara melakukan tanya jawab langsung dan bertatap muka kepada responden dan

objek yang akan menjadi bahan untuk pengumpulan data-data. Dalam teknik wawancara peneliti terjun langsung kelapangan dan mencari informasi dari objek dan responden dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan apa yang di teliti. Peneliti akan mendengarkan langsung dan akan mendapatkan informasi langsung dari responden berkenaan masalah yang sedang diteliti.

Dalam penelitian ini peneliti akan mencari informasi-informasi yang sesuai dengan keperluan penelitian, yakni:

a. Perencanaan pembiayaan sarana dan prasarana

- 1) bagaimana perencanaan pendapatan dan pengeluaran pembiayaan Sarana dan Prasarana pondok pesantren?
- 2) Siapa saja yang terlibat dalam penyusunan perencanaan pembiayaan Sarana dan Prasarana pondok pesantren?

b. Pelaksanaan pembiayaan sarana dan prasarana

- 1) Siapa saja yang melaksanakan manajemen pembiayaan Sarana dan Prasarana pondok pesantren?
- 2) Dari mana sumber dana pembiayaan Sarana dan Prasarana pondok pesantren?
- 3) Untuk apa saja biaya Sarana dan Prasarana pondok pesantren tersebut?

c. Pengendalian Akuntabilitas pembiayaan sarana dan prasarana

- 1) Kapan dilakukannya pengendalian akuntabilitas pembiayaan Sarana dan Prasarana pondok pesantren?

- 2) Siapa saja yang melakukan akuntabilitas pembiayaan Sarana dan Prasarana pondok pesantren?
- 3) Kepada siapa saja dilakukannya pengendalian akuntabilitas pembiayaan pendidikan?
- 4) Apa tujuan dari pengendalian akuntabilitas pembiayaan Sarana dan Prasarana pondok pesantren?

2. Observasi

Rusady Roslan. (2010:33) Teknik ini digunakan untuk merekam data-data primer berupa peristiwa atau situasi social tertentu pada lokasi penelitian yang berhubungan dengan focus penelitian. Menurut Lincoln dan Guba, mengklasifikasi observasi dengan tiga cara, yaitu: pertama, pengamat bertindak seperti partisipan atau nonpartisipan. Kedua, observasi dapat dilakukan dengan terang-terangan. Ketiga, menyangkut latar belakang, observasi yang dilakukan secara alami dan dirancang analog dengan wawancara terstruktur atau tidak terstruktur. Metode observasi adalah suatu pengamatan yang khusus dan pencatatan yang sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki.

3. Dokumentasi

Dalam pemilihan dokumen perlu diperhatikan mengenai derajat relevansi. Baik ditinjau dari isi materi dokumen maupun pihak-pihak yang memiliki atau mengeluarkan dokumen tersebut. Relevansi dari sisi isi materi dokumen adalah menggunakan dasar kisi-kisi ruang lingkup penelitian. Relevansi dari sisi pemilik dokumen mengandung pengertian bahwa dokumen tersebut merupakan catatan resmi yang memiliki nilai.

Artinya pihak yang mengeluarkan dan atau memiliki dokumen tersebut memang pihak yang memiliki kompetensi mengenai dokumen tersebut.

Adapun yang akan didokumentasi nanti disaat penelitian yaitu, Profil pondok pesantren, rekapitulasi laporan keuangan, dan berkas-berkas yang menjadi pendukung untuk penelitian.

F. Teknik Pengabsahan Data

Maksud dari pengabsahan data ini adalah untuk menjamin bahwa semua data yang telah diteliti baik melalui wawancara, obseervasi, ataupun melalui teknik dokumentasi adalah dan relevan dengan kenyataannya sesungguhnya. Selain itu hal-hal yang disampaikan tentang permasalahan dalam penelitian adalah benar-benar terjadi dan ada dilokasi penelitian.

Terkait dengan secara langsung pengabsahan data ini, penulis menggunakan teknik *trianggulasi*. *Trianggulasi* adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan data itu. Adapun trianggulasi yang dipakai dalam penelitian ini adalah trianggulasi sumber. Hal ini dimaksudkan untuk membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif.

G. Teknik Analisis Data

Data-data yang telah diperoleh dilokasi penelitian dianalisis dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Dan merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data.

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang sudah tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan penyajian tersebut dapat berbentuk matriks, grafiks, jaringan, dan bagan.

3. Menarik Kesimpulan dan Verifikasi

Penarikan kesimpulan dengan verifikasi dilakukan dengan melihat kembali pada reduksi data maupun pada *display* data, sehingga kesimpulan yang diambil tidak menyimpang dari data yang dianalisis

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Profil Pondok Pesantren Darul Amin

Menurut keputusan kepala kantor kementerian agama Kota Palangka Raya, nomor: B-3454/Kk.15.5/3/PP.00.7/2017, tentang izin operasional penyelenggaraan Pondok Pesantren Darul Amin Palangka Raya Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Palangka Raya

Membaca : Surat Permohonan Kepala Pondok Pesantren Darul Amin Palangka Raya tentang permohonan izin operasional penyelenggaraan Pondok Pesantren Darul Amin Palangka Raya.

Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Keagamaan Islam maka dipandang perlu untuk memberikan izin operasional kepada Pondok Pesantren Darul Amin Palangka Raya

2. Bahwa Pondok Pesantren Darul Amin Palangka Raya dipandang memenuhi syarat untuk diberikan izin operasional menyelenggarakan pendidikan keagamaan Islam.

Mengingat : 1. UU Nomor 20 tahun 2003 tentang system pendidikan nasional;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan nasional
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1991 tentang pendidikan luar sekolah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007 tentang pendidikan agama dan keagamaan
6. KMA Nomor 18 tahun 1985 tentang susunan organisasi dan tata kerja kementerian agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan KMA No 3 tahun 2006

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Palangka Raya tentang izin operasional penyelenggaraan Pondok Pesantren Darul Amin Palangka Raya

Kesatu : Memberi izin operasional kepada
Nama pondok pesantren : Darul Amin
Alamat : Jl. G. Obos XII Jl. Yakut 1 No.18
Desa/Kelurahan : Menteng
Kota : Palangka Raya
Provinsi : Kalimantan Tengah
Nama Yayasan : Al Amin

Berdiri tahun : 1999

Sebagai lembaga yang menyelenggarakan pendidikan
Keagamaan Islam dengan nomor statistik: 510062710004

- Kedua : Dalam penyelenggaraannya harus sesuai dengan pedoman penyelenggaraannya Madrasah Diniyah Takmiliyah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan apabila tidak dapat menyelenggarakan kegiatan pembelajaran kegiatan pembelajaran sehingga akhirnya dinyatakan tutup, maka unit penanggung jawab berhak mencabut dan nomor statistik yang sudah dicabut/dihapus tidak dapat digunakan oleh lembaga lainnya dengan alasan apapun
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya
- Keempat : Surat keputusan ini disampaikan kepada kepala pondok pesantren yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mekanisme pengangkatan pengurus Pondok Pesantren telah diatur dalam AD/ART pondok pesantren sendiri dalam BAB VIII Pasal 19 yang menyatakan bahwa Pimpinan pondok pesantren bersifat politis, kolektif, erta fleksibel dengan terjadinya rotasi secara otomatis dari anggota dewan pengurus yang terkait oleh keluarga besar pondok pesantren.

1. Pimpinan pondok pesantren dapat menunjuk seseorang untuk menjadi pengurus pesantren dengan mengutamakan personal dari dewan serta disetujui oleh dewan pengasuh

Struktur Pengurus Pondo Pesantren Darul Amin Kota Palangka Raya:

Ketua Yayasan Al Amin : Dr. Ir. H. Abdul Mukti, M.P

Pimpinan Pondok Pesantren : Achmad Junaidi, M.Pd.I

Sekretaris : Gafur Rahman, SE

Bendahara : Ahmad Rijani, SE

Bidang Pendidikan Pesantren : Wildan Anshari, S.Ag

Bidang Ibadah dan Amaliah : Abdurrahman, M.Pd

Bidang Humas : M. Ghufron

Bidang Kelengkapan Administrasi : Nur Salam, I.I.B

Bidang Pendidikan Al-Qur'an Metode Tilawati : Abdul Aziz

Bidang Perizinan : Ridwanudin

Bidang Sarana Prasarana dan Insfratraktur : Ahmad Rijani S.E

Bidang Ketertiban dan Keamanan : Syukriansyah

Visi Pondok Pesantren Darul Amin:

“Terwujudnya tatanan umat yang Islami, berkualitas, harmonis, aman, dan sejahtera”

Misi Pondok Pesantren Darul Amin:

“Menjadikan institusi yang mampu bersama dan bekerja sama dengan umat sekitar membangun dirinya sendiri dalam mewujudkan tatanan umat yang Islami, berkualitas, harmonis, dan sejahtera”

Motto Pondok Pesantren Darul Amin:

“Mencerdaskan dan mensejahterakan umat”

B. Sarana dan Prasaran Pondok Pesantren Darul Amin

Setelah ditelusuri berdasarkan hasil wawancara bersama pimpinan Pondok Pesantren Darul Amin sarana dan prasarana yang terdapat pada Pondok Pesantren Darul Amin diantaranya yaitu:

Table 1 Sarana dan Prasarana

No	Jenis Sarpras	Jumlah
1	Asrama Putra	8 Kamar
2	Asrama Putri	5 Kamar
3	Mobil Operasional	2 Unit
4	Ruang Kelas	4 Ruangan
5	Mesjid	1 bangunan
6	Meja Belajar	28 Buah
7	Ruang Penerimaan Santri Baru	1 Bangunan
8	Listrik	
9	Wifi	
10	Dapur	1 Ruangan
11	Budidaya Ikan	4 Kolam

12	Pengisian Air Minum	1 Unit
13	Kitab	

C. Hasil Penelitian

Pada bagian ini akan dipaparkan beberapa hal mengenai manajemen pembiayaan sarana dan prasarana Pondok Pesantren Darul Amin yang mana pada manajemen pembiayaan sarana dan prasarana tersebut lebih menekankan pada pemeliharaan sarana dan prasarana skala umum dan skala prioritas yang tersedia pada Pondok Pesantren Darul Amin Kota Palangka Raya, dengan cakupan yang telah peneliti dapatkan yaitu (1) Perencanaan pembiayaan sarana dan prasarana pada Pondok Pesantren Darul Amin Kota Palangka Raya (2) Pelaksanaan pembiayaan sarana dan prasarana pada Pondok Pesantren Darul Amin Kota Palangka Raya (3) Pengendalian akuntabilitas atau pertanggung jawaban pembiayaan sarana dan prasarana pada Pondok Pesantren Darul Amin Kota Palangka Raya.

1. Perencanaan Pembiayaan Sarana dan Prasarana pada Pondok Pesantren Darul Amin Kota Palangka Raya

Manajemen yang baik harus diawali dengan perencanaan yang baik pula, agar manajemen tersebut berjalan dengan lancar dan sesuai dengan apa yang diharapkan. Perencanaan memudahkan dalam proses pelaksanaan kegiatan karena sudah terarah dan mengetahui apa saja yang akan diperbuat dalam proses kegiatan.

Dalam wawancara pada perencanaan pembiayaan sarana dan prasarana pada Pondok Pesantren Darul Amin peneliti mendapatkan hasil

yang dapat dijelaskan bahwa ada beberapa tahap perencanaan pembiayaan sarana dan prasarana yang dilakukan, tahap yang pertama mengelola penerimaan dari berbagai macam sumber dana, yaitu penyusunan anggaran kebutuhan, menganalisis kebutuhan, penentuan skala prioritas dan pembagian tugas dan wewenang. Perencanaan pembiayaan sarana dan prasarana pada Pondok Pesantren Darul Amin Kota Palangka Raya dilakukan pada awal bulan ataupun akhir bulan, hal tersebut disampaikan dalam proses wawancara yang dilakukan peneliti terhadap pimpinan Pondok Pesantren Darul Amin Kota Palangka Raya yang menyatakan bahwa:

“Pondok Pesantren ada rapat akhir bulan disitu disampaikan apa yang sudah rusak untuk diperbaiki dan apa yang bisa diperbaiki maka harus diperbaiki, intinya setiap awal bulan atau akhir bulan ada rapat yang menentukan sarana dan prasarana mana yang perlu diperbaiki atau ditambah tergantung pada hasil rapat tersebut” (wawancara dengan pimpinan Pondok Pesantren Darul Amin Kota Palangka Raya)

Dalam perencanaan pembiayaan sarana dan prasarana Pondok Pesantren Darul Amin Kota Palangka Raya ada beberapa sarana dan prasarana yang pembiayaannya bersifat skala prioritas pada pemeliharaannya, dengan rincian sebagai berikut:

a. Listrik

Pada perencanaan pembiayaan listrik merupakan prioritas bagi Pondok Pesantren Darul Amin dengan pendanaan yang setiap bulannya telah direncanakan oleh Pondok Pesantren Darul Amin. Dalam perencanaan pembiayaan listrik sendiri masuk kedalam

rencana dana taktis yang telah disiapkan oleh pihak Pondok Pesantren Darul Amin

b. Mobil Operasional

Pondok Pesantren Darul Amin memiliki dua unit mobil operasional yang mana memiliki perencanaan pembiayaan pemeliharaan setiap bulannya. Pada perencanaan pembiayaan mobil operasional yang dimiliki oleh Pondok Pesantren Darul Amin sendiri untuk pemeliharaannya telah ditetapkan jumlah dana yang tertuang pada perencanaan pembiayaan sarana dan prasarana yaitu, Rp. 4.250.000, Hal tersebut disampaikan secara langsung oleh bendahara Pondok Pesantren Darul Amin

“untuk pembiayaan perawatan mobil operasional sendiri telah ditetapkan dengan jumlah Rp. 4.250.000 perbulan” (wawancara dengan pimpinan Pondok Pesantren Darul Amin Kota Palangka Raya)

c. Wifi

Untuk perencanaan pembiayaan wifi pada Pondok Pesantren Darul Amin telah ditetapkan jumlah dana yang harus dikeluarkan oleh pihak Pondok Pesantren Darul Amin sesuai dengan tagihan wifi setiap bulannya dan sama seperti pembiayaan listrik dana tersebut juga masuk kedalam rencana dana taktis.

d. Dapur

Pada bangunan atau gedung dapur sendiri tidak ada perencanaan pembiayaan secara prioritas karena untuk pembiayaan gedung atau bangunan dapur terjadi apabila adanya kerusakan atau kekurangan

sehingga memerlukan dana untuk perbaikan dan penambahan, akan tetapi perencanaan pembiayaan di dapur lebih memprioritaskan pada bagian konsumsi para santri. Untuk pembiayaan konsumsi para santri sendiri telah ditetapkan perencanaan pembiayaannya sebesar Rp. 20.000.0000.

e. Pengisian air minum

Pada hasil wawancara peneliti dengan pimpinan Pondok Pesantren Darul Amin dijelaskan bahwa pemeliharaan pengisian air minum yang ada pada Pondok Pesantren Darul Amin dilakukan setiap minggu bukan lagi setiap bulan

“seperti air minum yang perawatannya setiap minggu karena penggunaannya setiap hari” (wawancara dengan pimpinan Pondok Pesantren Darul Amin Kota Palangka Raya)

Namun pada wawancara tersebut tidak dijelaskan berapa biaya yang dikeluarkan pondok peantren Darul Amin untuk pemeliharaan pengisian air minum tersebut, akan tetapi dana yang digunakan untuk pemeliharaan pengisian air minum tersebut di dapat dari hasil usaha pengisian air minum itu sendiri, artinya dana yang didapat tidak secara langsung dari pembiayaan Pondok Pesantren Darul Amin.

f. Kitab-kitab

Dalam perencanaan pembiayaan kitab-kitab yang ada pada Pondok Pesantren Darul Amin ditetapkan pembiayaannya setiap semester untuk pembelian kitab-kitab itu sendiri dan biayanya

ditanggung oleh para santri sedangkan pihak Pondok Pesantren Darul Amin hanya menentukan kitab-kitab yang akan dibeli dan tempatnya.

Untuk rincian perencanaan pembiayaan yang didapat dari hasil observasi pada laporan keuangan yang ada pada Pondok Pesantren dalam kurung waktu bulan januari sampai dengan bulan agustus tahun 2020 dapat dijelaskan sebagaimana tabel berikut ini:

Table 2 Perencanaan Pembiayaan

No	Bulan	Keterangan	Jumlah
1	Januari	Dana Taktis	Rp. 10.000.000
2	Februari	Dana Taktis	Rp. 14.270.000
3	Maret	Dana Taktis	Rp. 15.000.000
4	April	Dana Taktis	Rp. 5.000.000
5	Mei	Dana Taktis	Rp. 5.000.000
6	Juni	Dana Taktis	Rp. 6.000.000
7	Juli	Dana Taktis	Rp. 6.000.000
8	Agustus	Dana Taktis	Rp. 6.000.000

Untuk perencanaan pembiayaan jenis sarana dan prasarana lainnya yang ada pada Pondok Pesantren Darul Amin yang bukan menjadi sarana dan prasarana dengan skala prioritas dalam perencanaan pembiayaannya, seperti bangunan-bangunan asrama putra atau putri, ruang kelas, mesjid, ruang penerimaan santri baru, meja belajar, dan budidaya ikan. Maka dalam perencanaan pembiayaannya sendiri tidak mesti dilakukan secara rutin perbulan, perencanaan pembiayaannya dilakukan pada saat adanya kerusakan atau kekurangan pada sarana dan prasarana tersebut sehingga memerlukan perbaikan atau penembahan. Maka dengan itu ditentukan lah pembiayaan yang harus dilakukan oleh pihak Pondok

Pesantren Darul Amin sesuai dengan kesepakatan hasil rapat awal atau akhir bulan.

Rencana anggaran pendapatan dan belanja pondok pesantren sendiri harus berdasarkan pada rencana pengembangan pondok pesantren. Rencana anggaran tersebut meliputi penganggaran, untuk kegiatan pengajaran, renovasi bangunan, dan pemeliharaan sarana pembelajaran. Dalam penyusunan rencana tersebut melibatkan seluruh warga Pondok Pesantren Darul Amin, seperti yang disampaikan pimpinan pondok:

“semua terlibat dalam rapat akhir bulan, dari pihak yayasan datang, pengasuh pondok, panti asuhan, dan seluruh pengajar terlibat, karena rapat akhir bulan tersebut menentukan semua kegiatan dalam satu bulan kedepan” (wawancara dengan pimpinan Pondok Pesantren Darul Amin Kota Palangka Raya)

Namun yang diberikan wewenang untuk menerima dana dari setia sumber adalah bendahara pondok pesantren hal tersebut peneliti dapatkan dari hasil observasi tentang perencanaan pembiayaan sarana dan prasarana pada Pondok Pesantren Darul Amin, yang mana observasi yang dilakukan oleh peneliti dilakukan kepada bendahara pondok pesantren yang diberikan tugas untuk secara langsung menerima pembayaran dari santri ataupun dana dari sumber lainnya sehingga perencanaan pembiayaan berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

Dalam penyusunan rencana pembiayaan sarana dan prasarana pondok pesantren harus sesuai kebutuhan-kebutuhan untuk sarana dan prasarana yang akan dikelola dalam jangka waktu satu bulan kedepan. Dalam perencanaan pembiayaan berisi rencana penerimaan dan

pengeluaran yang akan digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan pembiayaan sarana dan prasaran pondok pesantren selama satu bulan kedepan. Apabila tidak sesuai dengan perencanaan yang telah ditentukan maka akan digunakan dana taktis yang mana dana tersebut telah disiapkan pada rapat perencanaan awal atau akhir bulan. Hal tersebut seperti yang disampaikan oleh pimpinan pondok:

“kalau yang sifatnya harus segerakan ada yang namanya dana taktis yang bisa dipakai kapan saja untuk keperluannya yang sangat mendesak, misalkan ada sesuai yang harus cepat diperbaiki dan apabila tidak segera diperbaiki akan berakibat kepondok sendiri, seperti listrik yang mati, nggak bisa nunggu akhir bulan itu harus segera diperbaiki menggunakan dana taktis dibulan itu”
(wawancara dengan pimpinan Pondok Pesantren Darul Amin Kota Palangka Raya)

Hal ini juga didukung dengan metode dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti bahwa Berdasarkan hasil dokumentasi dapat dilihat perencanaan pembiayaan sarana dan prasarana pada Pondok Pesantren Darul Amin Kota Palangka Raya yang dapat dilihat format penyusunan pada kebutuhan, penentuan skala prioritas, dan pembagian tugas atau wewenang

Maka dapat diberikan kesimpulan bahwa dalam perencanaan pembiayaan sarana dan prasarana yang dilakukan oleh Pondok Pesantren Darul Amin Kota Palangka Raya sudah baik karena sudah mempersiapkan segala sesuatunya dengan penuh perhitungan mulai dari penerimaan, pengeluaran, sampai dengan dana tak terduga lainnya.

2. Pelaksanaan Pembiayaan Sarana dan Prasarana pada Pondok Pesantren Darul Amin Kota Palangka Raya

Pada proses pelaksanaan pembiayaan sarana dan prasarana pada Pondok Pesantren Darul Amin meliputi dua hal yaitu penerimaan dan pengeluaran. Penerimaan terhadap pembiayaan sarana dan prasarana ditentukan oleh besarnya penerimaan yang diterima oleh Pondok Pesantren Darul Amin dari setiap sumber, sedangkan untuk pengeluaran tentunya harus sesuai dengan perencanaan pembiayaan sarana dan prasarana Pondok Pesantren Darul Amin. Pengeluaran pembiayaan sarana dan prasarana dipergunakan secara efektif dan efisien, artinya setiap penerimaan dan pengeluaran harus didasarkan pada kebutuhan-kebutuhan yang telah direncanakan, terutama untuk sarana dan prasarana yang pemeliharaannya bersifat skala prioritas maka pelaksanaan pembiayaannya pun harus sesuai dengan perencanaan sebelumnya, sarana dan prasarana tersebut yaitu :

a. Listrik

Pelaksanaan pembiayaan listrik untuk membayar tagihan listrik Pondok Pesantren darul Amin yang mana pelaksanaan pembiayaannya telah ditentukan dalam hasil rapat bulanan yang dilakukan oleh pihak Pondok Pesantren Darul Amin yang mana pelaksanaan pembiayaannya diambil dari dana taktis yang telah disiapkan, sehingga dalam pelaksanaannya dana yang digunakan tidak akan berpengaruh kepada pembiayaannya yang lainnya. Rincian pelaksanaan pembiayaan listrik

Pada Pondok Pesantren Darul Amin pada bulan januari sampai agustus tahun 2020 telah dijelaskan sebagaimana table-tabel berikut ini:

Table 3 Pelaksanaan pembiayaan listrik bulan januari

No	Keterangan	Jumlah
1	Listrik kantor	Rp. 505.000
2	Listrik asrama putri baru	Rp. 205.000
3	Listrik dapur	Rp. 506.000
4	Listrik ust. Sayuti	Rp. 205.000
5	Listrik asrama putra	Rp. 504.000
6	Listrik koperasi	Rp. 505.000
7	Listrik masjid	Rp. 505.000

Table 4 Pelaksanaan pembiayaan listrik bulan februari

No	Keterangan	Jumlah
1	Listrik kantor	Rp. 755.000
2	Listrik asrama putri baru	Rp. 505.000
3	Listrik dapur	Rp. 506.000
4	Listrik ust. Sayuti	Rp. 505.000
5	Listrik asrama putra	Rp. 755.000
6	Listrik koperasi	Rp. 505.000
7	Listrik masjid	Rp. 505.000

Table 5 Pelaksanaan pembiayaan listrik bulan maret

No	Keterangan	Jumlah
1	Listrik kantor	Rp. 505.000
2	Listrik asrama putri baru	Rp. 458.000
3	Listrik dapur	Rp. 610.000
4	Listrik ust. Sayuti	Rp. 205.000
5	Listrik asrama putra	Rp. 505.000
6	Listrik koperasi	Rp. 505.000
7	Listrik masjid	Rp. 505.000

Table 6 Pelaksanaan pembiayaan listrik bulan april

No	Keterangan	Jumlah
1	Listrik kantor	Rp. 505.000
2	Listrik asrama putri baru	Rp. 708.000
3	Listrik dapur	Rp. 506.000
4	Listrik mas Aziz	Rp. 203.000
5	Listrik ust. Sayuti	Rp. 203.000
6	Listrik asrama putra	Rp. 505.000
7	Listrik koperasi	Rp. 203.000
8	Listrik masjid	Rp. 203.000

Table 7 Pelaksanaan pembiayaan listrik bulan mei

No	Keterangan	Jumlah
1	Listrik kantor	Rp. 505.000
2	Listrik asrama putri baru	Rp. 708.000
3	Listrik dapur	Rp. 506.000
4	Listrik mas Aziz	Rp. 203.000
5	Listrik ust. Sayuti	Rp. 203.000
6	Listrik asrama putra	Rp. 505.000
7	Listrik koperasi	Rp. 203.000
8	Listrik masjid	Rp. 203.000

Table 8 Pelaksanaan pembiayaan listrik bulan juni

No	Keterangan	Jumlah
1	Listrik kantor	Rp. 203.000
2	Listrik asrama putri	Rp. 406.000
3	Listrik dapur	Rp. 203.000
4	Listrik mas Aziz	Rp. 203.000
5	Listrik ust. Sayuti	Rp. 203.000
6	Listrik asrama putra	Rp. 203.000
7	Listrik koperasi	Rp. 403.000
8	Listrik masjid	Rp. 203.000

Table 9 Pelaksanaan pembiayaan listrik bulan juli

No	Keterangan	Jumlah
1	Listrik kantor	Rp. 203.000
2	Listrik asrama putri	Rp. 406.000
3	Listrik dapur	Rp. 203.000
4	Listrik mas Aziz	Rp. 203.000
5	Listrik ust. Sayuti	Rp. 203.000
6	Listrik asrama putra	Rp. 406.000
7	Listrik koperasi	Rp. 203.000

Table 10 Pelaksanaan pembiayaan listrik bulan agustus

No	Keterangan	Jumlah
1	Listrik kantor	Rp. 203.000
2	Listrik asrama putri	Rp. 812.000
3	Listrik dapur	Rp. 503.000
4	Listrik mas Aziz	Rp. 203.000
5	Listrik ust. Sayuti	Rp. 309.000
6	Listrik asrama putra	Rp. 610.000
7	Listrik koperasi	Rp. 406.000

b. Mobil Operasional

Pelaksanaan pembiayaan mobil operasional Pondok Pesantren difokuskan pada pemeliharaan mobil yang dilakukan secara rutin setiap bulannya untuk membayar cicilan mobil tersebut serta perawatan mobilnya. Sesuai dengan perencanaan sebelumnya dana yang digunakan untuk pelaksanaan pembiayaan mobil operasional Pondok Pesantren Darul Amin dengan dana sebesar Rp. 4.250.000 dengan rincian pembayaran cicilan mobil dalam jangka waktu 48 bulan atau 4 tahun. Rincian pelaksanaan pembiayaan mobil operasional Pada Pondok Pesantren Darul Amin pada bulan januari

sampai agustus tahun 2020 telah dijelaskan sebagaimana table berikut ini:

Table 11 Pelaksanaan pembiayaan mobil operasional tahun 2020

No	Bulan	Keterangan	Jumlah
1	Januari	Bensin mobil operasional	Rp. 50.000
		Transportasi ke Tengking	Rp. 150.000
2	Februari	Tranprotasi di Martapura	Rp. 600.000
		Transportasi distribusi kotak amal	Rp. 400.000
		Transportasi MTQ santri	Rp. 300.000
3	Maret	Transportasi MTP	Rp. 1.000.000
4	April	Bensin mobil operasional	Rp. 100.000
5	Mei	Bensin mobil operasional	Rp. 100.000
6	Juni	Bensin mobil operasional	Rp. 150.000
7	Juli	Bensin mobil operasional	Rp. 350.000
8	Agustus	Bensin mobil operasional	Rp. 300.000

c. Wifi

Pelaksanaan pembiayaan wifi yang ada pada Pondok Pesantren Darul Amin berfokuskan pada pembayaran tagihan wifi itu sendiri dan sama seperti pelaksanaan pembiayaan listrik untuk pelaksanaan pembiayaan wifi pembayaran tagihannya menggunakan dana taktis yang telah disiapkan oleh pihak Pondok Pesantren Darul Amin melalui rapat bulanan. Rincian pelaksanaan pembiayaan pembayaran wifi Pada Pondok Pesantren Darul Amin pada bulan januari sampai agustus tahun 2020 telah dijelaskan sebagaimana table berikut ini:

Table 12 Pelaksanaan pembiayaan wifi tahun 2020

No	Bulan	Keterangan	Jumlah
1	Januari	Pembayaran wifi	Rp. 500.000
2	Februari		Rp. 500.000

3	Maret	Rp. 500.000
4	April	Rp. 420.000
5	Mei	Rp. 420.000
6	Juni	Rp. 450.000
7	Juli	Rp. 450.000
8	Agustus	Rp. 500.000

d. Dapur

Sesuai dengan perencanaan yang telah disepakati dalam pelaksanaan pembiayaan pada bagian dapur sendiri lebih terfokuskan untuk pembiayaan konsumsinya bukan bangunannya karena untuk pembiayaan bangunannya tidak bersifat skala prioritas, kecuali ada kerusakan atau kekurangan maka pelaksanaan pembiayaan bangunan dapur dilakukan, sedangkan dalam pelaksanaan pembiayaan konsumsi para santri dilaksanakan untuk membeli segala kebutuhan pokok para santri dibagian dapur dengan menggunakan dana yang telah disiapkan melalui kesepakatan bersama pada rapat bulanan.

e. Pengisian air minum

Pelaksanaan pembiayaan pengisian air minum yang dimiliki oleh Pondok Pesantren Darul Amin sebetulnya tidak secara langsung menggunakan dana yang tersedia pada Pondok Pesantren Darul Amin melainkan menggunakan hasil penjualan air minum itu sendiri, oleh sebab itu pembiayaannya tidak berpengaruh secara langsung kepada pembiayaan Pondok Pesantren Darul Amin, akan tetapi dalam proses pelaksanaannya terfokuskan pada pemeliharaan pengisian air minum

itu sendiri yang mana dilakukan secara rutin bukan lagi perbulan tetapi bisa perminggu tergantung dengan penggunaannya.

f. Kitab-kitab

Pelaksanaan pembiayaan kitab-kitab lebih terfokuskan pada pembelian kitab-kitab yang dilakukan oleh para santri dengan jangka waktu persemester atau pertahun, yang mana para santri membayar kepada pihak pondok pesantren Darul Amin untuk membeli kitab-kitab tersebut sesuai dengan pelajaran-pelajaran yang ada pada Pondok Pesantren Darul Amin.

Sementara itu untuk proses pelaksanaan penerimaan sumber dana menurut hasil wawancara bersama bendahara Pondok Pesantren Darul Amin disampaikan sumber penerimaan pondok Pesantren Darul Amin:

“kalau penerimaan pondok pesantren itu dari infaq, terus baru tahun 2021 ada pembayaran SPP yang dilakukan oleh santri Rp 100.000 perbulan akan tetapi dibayarnya perenam bulan sekali dan ada kerja sama dengan pengantar minyak namanya loading CPO, jadi yayasan kerja sama dengan pengantar minyak, cuma pendapatan yang berasal dari pengantar minyak ini tidak setiap bulan tetapi tergantung kontrak, jadi pondok dapatnya per empat bulan sekali dan tidak menentu yang didapat bisa Rp15.000.000 atau Rp.20.000.000”(wawancara dengan bendahara Pondok Pesantren Darul Amin Kota Palangka Raya)

Dalam hal ini sumber penerimaan pembiayaan yang ada pada Pondok Pesantren Darul Amin sudah ditentukan dari mana saja sumbernya sehingga mempermudah dalam manajemen pembiayaan itu sendiri. Penerimaan pembiayaan Pondok Pesantren Darul Amin juga telah dijelaskan dalam ketentuan AD/ART Pondok Pesantren Darul Amin pada

BAB V Pasal 15 yang membahas tentang keuangan dengan menyatakan bahwa pembiayaan pendidikan/kegiatan Pondok Pesantren Darul Amin berasal dari:

- a. Ta'awun santri sesuai dengan ketentuan pondok pesantren
- b. Para donator dan simpatisan keluarga besar Pondok Pesantren Darul Amin
- c. Bantuan lain yang halal dan tidak mengikat dari lembaga/instansi pemerintah maupun swasta

Selanjutnya dari hasil observasi peneliti didapatkan bahwa dalam proses pelaksanaan pembiayaan diketahui dalam melaksanakan pengelolaan pembiayaan sarana dan prasarana pada Pondok Pesantren Darul Amin dilakukan dengan baik, dana yang diperoleh dari berbagai sumber Pondok Pesantren Darul Amin dikumpulkan pada bendahara Pondok Pesantren Darul Amin yang memiliki hak penuh. Pimpinan pondok atau pengurus lainnya yang memerlukan dana harus sesuai dengan hasil rapat pada perencanaan awal bulan atau akhir bulan, terlebih lagi dalam pembiayaan sarana dan prasarananya yang harus jelas sarana dan prasarana apa yang akan dibiayai.

Pelaksanaan pembiayaan sarana dan prasarana pada Pondok Pesantren Darul Amin dalam prosesnya dilakukan dari hasil berbagai rapat, dari hasil rapat tersebut telah dibuat rancangan kebutuhan-kebutuhan pembiayaan sarana dan prasarana yang sebelumnya telah dilaksanakan

pada bulan sebelumnya dan juga sarana dan prasarana yang membutuhkan tambahan biaya disesuaikan dengan besarnya biaya yang akan dikeluarkan

Hal tersebut senada dengan hasil dokumentasi yang dilakukan peneliti yang menyimpulkan bahwa pelaksanaan pembiayaan sarana dan prasarana pada Pondok Pesantren Darul Amin Kota Palangka Raya dapat dilihat dari hasil format penyusunan rencana pembiayaan sarana dan prasarana dan terlaksananya perencanaan tersebut sampai dengan waktu yang telah ditentukan.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pimpinan Pondok Pesantren Darul Amin didapatkan temuan mengenai pelaksanaan pembiayaan sarana dan prasarana Pondok Pesantren Darul Amin pada dasarnya pelaksanaan pembiayaan sarana dan prasarana pada Pondok Pesantren Darul Amin tidak selalu sesuai dengan perencanaan, hal tersebut juga disampaikan oleh pimpinan pondok pesantren:

“kalau pelaksanaan pembiayaan tergantung dengan apa yang diusulkan, seperti dimushola kamaren usulannya lima belas juta, usulan tersebut terlalu besar dan belum juga terealisasikan, akan tetapi untuk kebutuhan mendesak dimushola tidak juga, masih bisa dipakai dan dimanfaatkan musholanya, jadi dalam pelaksanaannya sendiri tidak mungkin 100% berjalan dengan baik” (wawancara dengan pimpinan Pondok Pesantren Darul Amin Kota Palangka Raya)

Maka dapat disimpulkan dari penjelasan pimpinan pondok pesantren bahwa dalam pelaksanaan pembiayaan sarana dan prasarana pada Pondok Pesantren Darul Amin belum sepenuhnya berjalan dengan baik akan tetapi setiap proses pelaksanaan pembiayaan sarana dan prasarana itu sendiri harus sesuai dengan perencanaan awal.

Berdasarkan hasil dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti dapat dilihat bahwa pelaksanaan pembiayaan sarana dan prasarana pada Pondok Pesantren Darul Amin Kota Palangka Raya dapat dilihat dari hasil format penyusunan rencana pembiayaan sarana dan prasarana dan terlaksananya perencanaan tersebut sampai dengan waktu yang telah ditentukan.

3. Pengendalian Akuntabilitas Pembiayaan Sarana dan Prasarana pada Pondok Pesantren Darul Amin Kota Palangka Raya

Dalam pengendalian akuntabilitas pembiayaan atau pertanggung jawaban pembiayaan sarana dan prasarana pada Pondok Pesantren Darul Amin Kota Palangka Raya merupakan salah satu proses yang harus dilakukan dalam manajemen pembiayaan sarana dan prasarana pada Pondok Pesantren Darul Amin. Pengendalian akuntabilitas dapat dilakukan berdasarkan kebutuhan dan kewenangan. Pimpinan pondok perlu melakukan pengendalian pengeluaran yang selaras dengan anggaran yang telah ditetapkan. Oleh sebab itu pada setiap pengeluaran harus menyertakan bukti kuitansinya, hal tersebut selarasa dengan apa yang disampaikan oleh pimpinan Pondok Pesantren Darul Amin:

“untuk bukti pengeluaran, misalkan pengeluaran hari ini sekian juta, selain ada catatan pengeluaran harus disertakan dengan kuitansinya dan itu bersifat wajib, selain laporan tertulis kuitansi harus ada dan diserahkan kepada bendahara pondok, kemudian dilaporkan kepada yayasan, dari yayasan kemudian melaporkan dinas sosial” (wawancara dengan pimpinan Pondok Pesantren Darul Amin Kota Palangka Raya)

Pengendalian akuntabilitas sarana dan Prasarana yang bersifat prioritas sangatlah penting dikarena laporan pertanggungjawaban sarana dan prasarana tersebut diperlukan untuk disampaikan oleh bendahara Pondok Pesantren Darul Amin pada rapat bulan yang dilakukan oleh pihak Pondok Pesantren Darul Amin Kota Palangka Raya. Rincian sarana dan prasarana tersebut yaitu:

a. Listrik

Pengendalian akuntabilitas pembiayaan listrik Pondok Pesantren Darul Amin Kota Palangka Raya dapat berupa kwitansi pembayaran tagihan listrik yang didapat setelah pembayaran listrik tersebut, kemudian setelah itu kwitansi tersebut diserahkan kepada bendahara pondok pesantren untuk dijadikan bukti laporan bulanan.

b. Mobil Operasional

Pengendalian akuntabilitas pembiayaan mobil operasional Pondok Pesantren dapat melampirkan bukti pembiayaan pembayaran cicilan atau pemeliharaan mobil tersebut.

c. Wifi

Pengendalian akuntabilitas pembiayaan wifi yang ada pada Pondok Pesantren Darul Amin Kota Palangka Raya dapat berupa bukti kwitansi pembayaran wifi yang didapatkan setelah pembayaran wifi tersebut dilaksanakan dan bukti tersebut diserahkan kepada bendahara pondok untuk dilampirkan sebagai bukti laporan.

d. Dapur

Pengendalian akuntabilitas pembiayaan untuk bagian dapur dapat berupa laporan pembelian bahan pokok yang diperlukan bagian dapur, laporan tersebut dibuat sendiri oleh bagian dapur dan diberikan kepada bendahara pondok pesantren setiap bulannya untuk dilaporkan kembali oleh bendahara pondok pesantren dirapat bulanan.

e. Pengisian air minum

Pengendalian akuntabilitas pembiayaan usaha pengisian air minum hanya berupa penyampaian pendapatan dan pengeluaran usaha pengisian air minum tersebut dan bukti fisik yang diberikan adalah catatan-catatan penerimaan dan pengeluaran tersebut.

f. Kitab-kitab

Pengendalian akuntabilitas pembiayaan kitab-kitab tidak ada pertanggung jawaban khusus melainkan hanya memberikan kitab-kitab tersebut kepada para santri yang telah membeli kitab-kitab tersebut.

Pada proses observasi pengendalian akuntabilitas pembiayaan sarana dan prasarana dapat dilihat dari bentuk laporan yang diberikan bendahara pondok pesantren kepada pimpinan pondok pesantren dan pihak lainnya yang terkait pada setiap rapat. Laporan tersebut memuat penerimaan dan pengeluaran yang ada pada pembiayaan Pondok Pesantren Darul Amin Kota Palangka Raya

Kegiatan pengendalian akuntabilitas pada Pondok Pesantren Darul Amin dilakukan secara rutin, yaitu pada saat rapat awal bulan atau akhir bulan, sedangkan untuk pelaporan yang diedarkan kepihak-pihak terkait satu tahun sekali yaitu pada awal tahun.

Hasil dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti pada pengendalian akuntabilitas pembiayaan sarana dan prasarana Pondok Pesantren Darul Amin dapat dilihat dari hasil laporan yang dibuat oleh bendahara pondok pesantren dan kesesuaian laporan tersebut dengan perencanaan serta pelaksanaannya.



BAB V

PEMBAHASAN

Dalam pembahasan pada bab V akan membahas tentang temuan penelitian yang telah diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan pada Pondok Pesantren Darul Amin Kota Palangka Raya.

A. Perencanaan Pembiayaan Sarana dan Prasarana pada Pondok

Pesantren Darul Amin Kota Palangka Raya

Perencanaan merupakan langkah awal dalam mengidentifikasi segala kebutuhan (strategi, tujuan, dan tolak ukur) serta menentukan segala sesuatu yang berkaitan secara langsung dalam proses manajemen pembiayaan salah satunya dalam bidang sarana dan prasarana. Perencanaan sebagai suatu proses penentuan tujuan atau sasaran yang hendak dicapai dan menetapkan jalan dan sumber yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu seefisien dan seefektif mungkin juga dipraktikkan oleh Pondok Pesantren Darul Amin Kota Palangka Raya. Dalam perencanaan pembiayaan sarana dan prasarana pada Pondok Pesantren Darul Amin Kota Palangka Raya dibawah pimpinan pondok pesantren melakukan perencanaan dengan memperhatikan berbagai pihak yang kemudian dikaji dan pada akhirnya disusun terlebih dahulu sebagai bahan masukan perencanaan pembiayaan pada saat rapat dengan seluruh pengurus.

Perencanaan pembiayaan sarana dan prasarana pada Pondok Pesantren Darul Amin telah direncanakan atau disusun secara efektif dan efisien. Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan Nanang Fattah (2000:26)

bahwa dalam penyusunan anggaran adalah bagaimana memanfaatkan dana secara efisien, mengalokasikan secara tepat, sesuai skala prioritas. Itulah sebabnya dalam prosedur penyusunan pembiayaan memerlukan tahapan yang sistematis sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2003 pasal 48: pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas public.

Pondok Pesantren Darul Amin Kota Palangka Raya dalam melakukan perencanaan pembiayaan sarana dan prasarana pada prakteknya selalu dilakukan dengan rapat yang dihadiri seluruh pengurus. Hal ini dilakukan agar yang berkaitan dengan pembiayaan sarana dan prasarana dalam prosesnya dapat dilaksanakan semaksimal mungkin. Langkah ini sangat relevan dengan salah satu prinsip-prinsip Manajemen Pendidikan Islam Perspektif Al-Qur'an, prinsip bersifat demokratis yaitu Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah RI tentang Pendidikan (2006:23) manajemen demokratis bermakna bahwa, semua harus dimusyawarahkan bersama semua yang terlibat, seperti siswa, orang tua, yayasan, dan lain sebagainya, mereka harus diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya.

Pelaksanaan tersebut juga sejalan dengan yang diungkapkan Harjanto dalam Baihaqi (2012:40) adalah perencanaan adalah sebuah proses mempersiapkan kegiatan secara sistematis yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu.

Dalam Pelaksanaannya pihak Pondok Pesantren Darul Amin melakukan perencanaan pembiayaan sarana dan prasarana meliputi pendapatan dan pengeluaran dan penyusunan pembiayaan yang menganut prinsip pembagian wewenang yang memberikan tugas kepada bendahara pondok pesantren untuk mengelola pembiayaan sarana dan prasarana dari berbagai sumber. Pelaksanaan perencanaan pembiayaan yang dilakukan oleh bendahara pondok pesantren dalam hal ini sesuai dengan yang diungkapkan Fattah (2007:26) bahwa anggaran harus disusun berdasarkan prinsip-prinsip pembagian wewenang dan tanggungjawab yang jelas dalam manajemen organisasi, adanya system akuntansi yang memadai, adanya penelitian dan analisis untuk menilai kinerja organisasi, adanya dukungan dari pelaksana.

Akan tetapi dalam pelaksanaan rapat, pimpinan pondok pesantren dan para pengurus lainnya sudah melakukan perencanaan secara maksimal dengan memperhatikan tiga aspek perencanaan berikut ini:

1. Perencanaan pembiayaan sarana dan prasarana oleh pimpinan pondok pesantren dan pengurus lainnya melakukan kajian terhadap sarana dan prasarana yang ingin dibiayai dalam satu bulan ke depan. Sarana dan prasarana yang direncanakan harus memperhatikan keadaan pondok pesantren serta kemungkinan yang terjadi pada bulan-bulan berikutnya. Hal ini penting apabila perencanaan pembiayaan sarana dan prasarana yang disusun tidak berdasarkan pada keadaan yang sebenarnya terjadi pada pondok pesantren, maka akan membuat perencanaan tidak dapat dilaksanakan dengan baik karena tidak mendapat dukungan dari sumber

daya pondok pesantren. Adapun perencanaan yang tidak memperkirakan masa yang akan datang akan berakibat tidak akan mendapat dukungan pada bulan-bulan berikutnya.

2. Perencanaan pengeluaran. Perencanaan yang dilakukan pimpinan pondok pesantren dan para pengurus lainnya pada tahap selanjutnya adalah perencanaan pengeluaran untuk membiayai kebutuhan-kebutuhan sarana dan prasarana pondok pesantren . Perencanaan pengeluaran pada Pondok Pesantren Darul Amin kota Palangka Raya berdasarkan pada kemungkinan kemampuan pondok pesantren, sedangkan kemampuan pembiayaan pondok pesantren tergantung pada penerimaan dan pengeluaran yang ada pada setiap bulannya.
3. Perencanaan pendapatan, pimpinan pondok pesantren dan pengurus lainnya merencanakan penerimaan dan pengeluaran yang mungkin masuk ke pondok pesantren melalui berbagai segi dalam satu bulan anggaran. Pendapatan pondok pesantren digunakan untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang disusun pondok pesantren. Untuk itu target penerimaan dana yang bersumber dari orang tua santri seharusnya menjadi prioritas pondok pesantren

Ketiga aspek pelaksanaan perencanaan ini merupakan hasil kajian peneliti dari manajemen perencanaan yang diungkapkan oleh Ibrahim Bafadal (2006:43) bahwa manajemen perencanaan yang baik adalah sebagai berikut:

1. Dibuat oleh orang-orang yang memahami organisasi
2. Dibuat oleh orang-rang yang memahami perencanaan

3. Disertai dengan rincian yang teliti
4. Tidak terlepas dari pemikiran pelaksanaan
5. Terdapat tempat pengambilan resiko
6. Sederhana, luwes dan praktis
7. Didasarkan pada keadaan nyata untuk masa kini dan masa depan
8. Dibuat bersama
9. Di rekomendasikan oleh penguasa/pimpinan tertinggi.

Berdasarkan teori tersebut, maka pertimbangan 3 aspek perencanaan yang sudah terlaksana secara maksimal oleh pihak Pondok Pesantren Darul Amin Kota Palangka Raya, maka peneliti berpendapat bahwa manajemen perencanaan pembiayaan sarana dan prasarana pada Pondok Pesantren Darul Amin Kota Palangka Raya berjalan sangat baik karena perencanaan tersebut mempertimbangkan berbagai aspek dan tidak terlepas dari pelaksanaan dan kebutuhan-kebutuhan saat ini dan masa yang akan datang.

B. Pelaksanaan Pembiayaan Sarana dan Prasarana pada Pondok Pesantren Darul Amin Kota Palangka Raya

Setelah perencanaan pembiayaan sarana dan prasarana selesai dan disetujui oleh semua pihak yang terlibat, maka langkah selanjutnya dalam manajemen adalah pelaksanaan terhadap perencanaan yang telah dibuat. Pelaksanaan pembiayaan sarana dan prasarana secara umum bertujuan dilakukan untuk peningkatan mutu pendidikan. Strategi pengalokasian pembiayaan guna meningkatkan efisiensi penggunaan dana tersebut.

Pendekatan efisiensi ini dilakukan dengan tujuan mengantisipasi keterbatasan pada pembiayaan, prinsip ini dikenal dengan sebagai prinsip dasar dalam manajemen dalam pembiayaan ketika terjadi keterbatasan dalam sumber daya yang mengacu kepada perencanaan yang telah ditetapkan. Mekanisme ini ditempuh dalam pelaksanaan kegiatan harus benar efektif dan efisien. Penggunaan pembiayaan memperhatikan azas umum pengeluaran pondok pesantren, yaitu pemanfaatan penggunaan uang pondok pesantren minimal harus sama, apabila uang tersebut dipergunakan oleh pengelola pondok pesantren.

Adapun temuan dalam pelaksanaan pembiayaan sarana dan prasarana pada Pondok Pesantren Darul Amin Kota Palangka Raya bahwa pelaksanaannya pihak bendahara pondok pesantren bertugas sebagai pengatur apabila ada uang yang masuk baik dari santri ataupun sumber lainnya serta bertugas mengatur pengeluaran untuk dialokasikan kepada bidang sarana dan prasarana sesuai dengan yang tercantum dalam perencanaan sebelumnya.

Pelaksanaan manajemen pembiayaan sarana dan prasarana pada Pondok Pesantren Darul Amin dalam prosesnya melakukan berbagai rapat setiap awal bulan ataupun akhir bulan dengan seluruh pengurus. Sebelumnya perencanaan dibuat oleh pihak pondok pesantren dengan membuat rancangan kebutuhan-kebutuhan sarana dan prasarana yang telah dibuat yang membutuhkan tambahan biaya.

Secara garis besarnya pelaksanaan pembiayaan sarana dan prasarana pada Pondok Pesantren Darul Amin Kota Palangka Raya

melakukan dua jenis kegiatan yaitu penerimaan dan pengeluaran untuk berbagai kebutuhan, sebagaimana data temuan hasil peneliti kumpulkan.

Melihat dari keseluruhan bahwa data mengenai pelaksanaan pembiayaan sarana dan prasarana pada Pondok Pesantren Darul Amin Kota Palangka Raya, maka dapat diketahui bahwa setiap pelaksanaan pembiayaan tercatat. Hal ini sudah sesuai dengan pernyataan Sulistyorini (2009:35) yang menyatakan bahwa: Pembukuan anggaran, baik penerimaan maupun pengeluaran harus dilakukan secara tertib, teratur dan benar. Hal ini dilakukan supaya dapat membuat suatu laporan keuangan dan penggunaan yang jujur dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pendapat diatas sudah melekat dan telah dilaksanakan oleh bendahara, hanya saja bentuk pencatatan penerimaan dan pengeluaran tidak diklasifikasikan terutama dalam pencatatan pengeluaran, hal ini dianggap perlu agar mudah melakukan pengawasan serta keperluan dalam pelaporan yang akan datang.

C. Pengendalian Akuntabilitas Sarana dan Prasarana pada Pondok Pesantren Darul Amin Kota Palangka Raya

Laporan kegiatan atau laporan pertanggungjawaban adalah suatu ikhtisar tentang hal ikhwal pelaksana suatu kegiatan yang harus disampaikan oleh penanggung jawab kepada pihak yang memberi tugas sebagai pertanggungjawaban kegiatan yang berlangsung. Selain itu menurut septyanda (2011:1) laporan pertanggungjawaban juga memiliki definisi sebagai suatu dokumen tertulis yang disusun dengan tujuan memberikan

laporan tentang pelaksanaan kegiatan dari suatu unit organisasi kepada unit organisasi yang lebih tinggi derajatnya. Pengertian diatas menunjukkan bahwa laporan merupakan suatu uraian kegiatan yang telah terlaksana mulai dari awal hingga selesainya kegiatan yang diberikan kepada pimpinan dan pihak terkait untuk dipertanggung jawabkan.

Berkaitan dengan laporan pertanggungjawaban pembiayaan merupakan kewajiban bagi pengelola pendidikan, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 Bab VI pasal 59 ayat 1 d. dan 5 yang menjelaskan bahwa :

- 1) d. akuntabilitas publik.
- 5) Prinsip akuntabilitas publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan memberikan pertanggungjawaban atas kegiatan yang dijalankan oleh penyelenggara atau satuan pendidikan kepada pemangku kepentingan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Adapun hasil temuan yang diperoleh dengan teknik wawancara tentang pengendalian akuntabilitas atau laporan pertanggungjawaban penggunaan pembiayaan sarana dan prasarana pada Pondok Pesantren Darul Amin Kota Palangka Raya yang dibuat oleh bendahara pondok pesantren dalam bentuk buku kas yang mengacu pada penerimaan dan pengeluaran sebagai bahan laporan termasuk dalam hal ini bukti-bukti kwitansi pengeluaran.

Bentuk dari pengendalian akuntabilitas atau laporan pertanggung jawaban yang diberikan oleh bendahara Pondok Pesantren menurut peneliti

sudah memenuhi standar laporan pertanggungjawaban yang komprehensif, karena kriteria laporan pertanggungjawaban yang baik mampu memberikan informasi pelaksanaan pembiayaan, dari segi arus kas keuangan pondok pesantren, perkembangan, problem dan kesenjangan dalam pelaksanaan, dan alternatif pemecahan masalah. Sehingga laporan tersebut mampu memberikan gambaran bagi pimpinan untuk memberikan atau mengeluarkan kebijakan. Hal ini mengacu pada pendapat Matin (208) mengenai bentuk laporan, yaitu :

1. Menginformasikan kemajuan, perkembangan nyata atau realisasi fisik dan keuangan baik rutin maupun pembangunan dalam suatu periode tertentu.
2. Mengidentifikasi kesenjangan antara rencana dan program kerja. rutin dan pembangunan dengan realisasinya hingga kurun waktu tertentu.
3. Mengidentifikasi masalah yang timbul dan mengupayakan alternatif pemecahannya.
4. Memberikan informasi yang dibutuhkan pimpinan dan menjadi masukan bagi pimpinan untuk menentukan kebijaksanaan yang lebih tepat.

Berdasarkan pendapat diatas isi laporan harus dapat memberikan data dan informasi yang dibutuhkan dalam pembuatan kebijakan. Oleh karena itu, materi laporan harus akurat sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, dan disampaikan tepat waktu. Agar laporan yang disampaikan efektif, maka laporan tersebut harus disampaikan secara tertulis, disusun dan disajikan dalam bentuk format yang baku. Format laporan dapat dirancang sesuai dengan kebutuhan, mudah digunakan, dan dapat menampung data dan informasi yang penting.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang didapat pada penelitian kali ini terbagi kedalam beberapa penjelasan tentang manajemen pembiayaan sarana dan prasarana pada Pondok Pesantren Darul Amin Kota Palangka Raya yang mengacu pada perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian akuntabilitas

1. Perencanaan Pembiayaan Sarana dan Prasarana

Perencanaan pembiayaan sarana dan prasarana pada Pondok Pesantren Darul Amin Kota Palangka Raya yang dilakukan setiap rapat awal bulan ataupun akhir bulan dengan menentukan sarana dan prasarana yang menjadi prioritas dalam pembiayaannya seperti mobil operasional, listrik, wifi, dapur, dan pengisian air minum maka telah ditentukan jumlah pembiayaannya untuk jangka waktu perbulan sedangkan untuk jenis sarana dan prasarana lainnya seperti asrama putra dan putri, mobil operasional, ruang kelas, mesjid, meja belajar, ruang penerimaan santri baru dan budidaya ikan belum direncanakan jumlah pembiayaannya karena sarana dan prasarana tersebut sifatnya bukan prioritas atau perencanaan pembiayaannya terjadi apabila ada kerusakan atau kekurangan. Untuk rapat perencanaan pembiayaannya sendiri diikuti oleh pimpinan pondok pesantren serta pengurus lainnya. Perencanaan pembiayaan sarana dan prasarana tersebut berjalan dengan baik, hal ini dikarenakan pihak pondok pesantren telah memilih dan mengidentifikasi

sarana dan prasarana apa saja yang perlu untuk dibiayai dalam jangka waktu yang telah ditentukan

2. Pelaksanaan Pembiayaan Sarana dan Prasarana

Pelaksanaan pembiayaan sarana dan prasarana pada Pondok Pesantren Darul Amin Kota Palangka Raya lebih menekankan pada pemeliharaan sarana dan prasarana yang menjadi prioritas, seperti mobil operasional, listrik, wifi, dapur, dan pengisian air minum. Dalam pelaksanaannya sendiri mempunyai dua jenis kegiatan yaitu penerimaan dan pengeluaran. Dalam penerimaan pihak pondok pesantren menerima dana dari hasil infaq santri, SPP santri, dan dari donatur yang secara langsung dikelola oleh bendahara pondok pesantren yang memegang hak atau wewenang penuh dalam manajemen pembiayaan tersebut. pengeluarannya sendiri harus berdasarkan perencanaan yang telah ditentukan dari hasil rapat bersama.

3. Pengendalian Akuntabilitas Pembiayaan Sarana dan Prasarana.

Pengendalian akuntabilitas pembiayaan sarana dan prasarana pada Pondok Pesantren Darul Amin Kota Palangka Raya dilakukan berdasarkan kebutuhan dan kewenangan dengan berupa laporan yang melampirkan segala jenis penerimaan dan pengeluaran yang berkaitan dengan sarana dan prasarana pondok pesantren terutama untuk sarana dan prasarana yang pembiayaan pemeliharaannya bersifat prioritas dibandingkan sarana dan prasarana lainnya seperti mobil operasional, listrik, wifi, dapur, dan pengisian air minum dengan meyertakan bukti

kwitansi atau semacamnya. Pertanggungjawaban tersebut dilaporkan oleh bendahara pondok pesantren pada saat rapat awal atau akhir bulan dan laporan tersebut juga disebar luaskan kepada pihak-pihak yang terkait dengan jangka waktu tertentu dalam pembiayaan sarana dan prasarana pada Pondok Pesantren Darul Amin Kota Palangka Raya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti ditemukan permasalahan tentang manajemen pembiayaan sarana dan prasarana pada Pondok Pesantren Darul Amin Kota Palangka Raya. Maka dengan itu peneliti mengajukan beberapa saran dengan harapan dapat member masukan-masukan untuk memaksimalkan manajemen sarana dan prasarana pada Pondok Pesantren Darul Amin Kota Palangka Raya, yaitu:

1. Saran untuk pimpinan Pondok Pesantren Darul Amin Kota Palangka Raya agar lebih memperhatikan dan melengkapi ketersediaan sarana dan prasarana yang ada pada Pondok Pesantren Darul Amin agar Pondok Pesantren Darul Amin Kota Palangka Raya semakin berkembang
2. Saran untuk Bendahara Pondok Pesantren Darul Amin Kota Palangka Raya dalam pembiayaan sarana dan prasarana lebih diperhatikan lagi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawabannya sehingga dalam manajemen pembiayaan sarana dan prasarana tersebut menjadi lebih maksimal
3. Saran untuk penelitian selanjutnya agar dapat melanjutkan penelitian yang berkaitan dengan pembiayaan secara menyeluruh baik dari pembiayaan

pendidikan, operasional sampai dengan sarana dan prasarannya sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.



DAFTAR PUSTAKA

- Anis Muhaammad, 2013, *manajemen pembiayaan pendidikan di SDIT Assalamah Ungaran*
- Bafadal Ibrahim, 2006, *Manajemen Peningkatan Mutu Sekolah Dasar dari Sentralisasi ke Desentralisasi*, Jakarta: Bumi Aksara
- Baihaqi, 2012, *Manajemen Pembiayaan pada SMKN Aceh Besar, Jurnal Administrasi Pendidikan Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Volume 1, No.2*
- Barnawi dan M. Arifin, 2014, *Manajemen Sarana dan Prasarana Sekolah*, Jogjakarta: Arruz Media
- Budaya Budi, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan Pada Sekolah Dasar yang Efektif*, Malang
- Bungim Burhan, *Analisis Data Penelitian kualitatif* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013
- Dakir & Ahmad Fauzi, 2020. *Manajemen Mutu Pendidikan Islam Terpadu*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Dakir, dkk. 2016, *Manajemen Mutu Pendidikan*. Jakarta: Kencana
- Dapartemen Agama Republik Indonesia, *pedoman manajemen*
- Ek.Mokhtar Effendy, *Manajemen Suatu Pendekatan Berdasarkan Ajaran Islam*, Jakarta: Bhatara Karya Aksara, 1986,
- Fatimah Siti, 2012, *Pembiayaan Pendidikan Berbasis Umat*. AL-IDARAH
JURNAL KEPENDIDIKAN ISLAM, Vol 3 (1)
- Fattah Nanang, 2000, *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Fattah Nanang, 2007 *Konsep Manajemen Berbasis Sekolah dan Dewan Sekolah*, Bandung: Pustaka Bai Quraisy
- Hasbullah, *Otonomi Pendidikan*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2010)
- Ibrahim, *Metodologi penelitian kualitatif*, Bandung: Alfabeta,2015

- Lexy J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*
- LexyJ.Moleong, *Metodologi penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya,2000
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: PT Bumi Aksara,cet-IV,2004
- Mohammad Daud Ali dan Habibah Daud. *Lembaga–Lembaga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995)
- Mulaysa E, *Menjadi Kepala Sekolah Profesional*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005
- Musliana, 2019, *Pengelolaan keuangan di panti asuhan Darul Amin Palangka Raya*, Skripsi IAIN Palangka Raya
- Nasir Moh, *Metode penelitian hukum*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1999
- Peraturan, 2008, Pemerintah Republik Indonesia No. 48 Tahun 2008, tentang pendanaan pendidikan
- Saniah, *Manajemen keuangan di Madrasah Ibtidaiyah Al-Anwar Pangkalan Banteng Kotawaringin Barat*, 2017 Skripsi IAIN Palangka Raya
- Saroni Mohammad, 2012, *Orang Miskin Harus Sekolah*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media,
- Septryanda, 2011, “Laporan Pertanggungjawaban”, Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi.
- Sholihat, Saniyyah Siti, “*Pengelolaan biaya pendidikan, partisipasi masyarakat dan mutu layanan pembelajaran madrasah ibtidaiyah swasta di Bandung*”. (Magister Program Studi Administrasi Pendidikan, sekolah Pascasarjana, Bandung,2017)
- Sugiyono, *memahami penelitian kuantitatif*, bandung: alfabeta, 2010
- Sulistiorini, *Manajemen Pendidikan Islam*, Yogyakarta: Teras, 2009
- Sulistyorini, 2009, *Manajemen Pendidikan Islam Konsep Strategi dan Aplikasi*, Yogyakarta : Teras
- Supriadi Dedi, *Satuan Biaya Pendidikan SD, SLTP, SMU*, (Jakarta: Depdiknas, 2001)

Udin Syaefuddin Sa'ud, Abin Syamsudin Makmun, *Perencanaan Pendidikan Suatu Pendekatan Komprehensif*, (Bandung:Remaja Rosdakarya,2005),

Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah RI tentang Pendidikan, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI, Jakarta, 2006

Yulicha VIita Andini, 2018, *Manajemen pembiayaan pendidikan di yayasan Bakong Pittaya school Pattani Thailand selatan*

